

PERTUMBUHAN KOTA PANTAI MAKASSAR

DARMAWAN MAS'UD RAHMAN

MOHAMMAD NATSIR

ABD. RIFAI HUSAIN

**DITERBITKAN DENGAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT I PROPINSI SULAWESI SELATAN**

1993 / 1994

PERTUMBUHAN KOTA PANTAI MAKASSAR

DARMAWAN MAS'UD RAHMAN

MOHAMMAD NATSIR

ABD. RIFAI HUSAIN

**DITERBITKAN DENGAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT I PROPINSI SULAWESI SELATAN**

1993 / 1994

SUAKA PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA SULAWESI SELATAN DAN TENGGARA

KATA SAMBUTAN

Kehadiran Makassar dalam panggung sejarah telah melintasi kurun waktu yang cukup panjang. Proses sejarah yang panjang itu, menempatkan Makassar sebagai objek kajian sejarah dari berbagai aspek dimensinya. Salah satu upayah positif yang dilakukan oleh suatu tim penulis dari Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan dan Tenggara, yakni penulisan salah satu aspek kesejarahan Makassar, yang menekankan pada Makassar sebagai sebuah kota pantai. Pada aspek lain, dari penulisan ini juga berusaha menelusuri Makassar sebagai sebuah 'Kota', baik berfungsi sebagai kota raja juga sebagai pusat perdagangan dan kota maritim. Sehingga, tulisan ini diharapkan sebagai bagian dari rekonstruksi dan pemunculan kembali dimensi-dimensi kesejarahan di daerah ini. Dengan titik berat pada penelusuran Makassar sebagai sebuah kota, berarti pem-bahasan tentang pembentukan awal kota, pergeseran dan perubahan fungsinya dapat ditelusuri secara seksama.

Posisi Makassar sebagai kota kerajaan, kota dagang dan kota maritim, terkait berbagai kajian mengenai aspek-aspek budaya dan benturan-benturan budaya yang terjadi dalam masa kurun waktu yang panjang. Dengan demikian tulisan ini diharapkan mampu menjadi penambah sumber kesejarahan di Sulawesi Selatan.

Upaya rekonstruksi dan penulisan kembali kejadian-kejadian masa lampau seperti ini, perlu digalakkan agar kita tidak kehilangan masa lampau. Kita harus menyadari, bahwa makna masa lampau itu berfungsi sebagai tolok ukur masa sekarang dan bahan banding untuk masa yang akan datang. Diharapkan dokumentasi, rekonstruksi nilai-nilai kesejarahan dimunculkan sebanyak-banyaknya dari berbagai kalangan.

Semoga buku ini bermanfaat, utamanya terhadap pengkajian kejadian-kejadian masa lampau di daerah ini untuk penulisan yang lebih sempurna.

Ujung Pandang, Februari 1994

K e p a l a,



Dr. H. DARMAWAN MAS'UD RAHMAN, MSc.

NIP. 130 207 910

KATA PENGANTAR

Gagasan tentang rekonstruksi dan penulisan kejadian masa lampau sangat penting. Hal ini didasarkan pada fungsi, peran dan makna catatan sejarah, yang akan tetap hadir sesuai dengan tingkat keberadaannya, kadar ilmiah, kelengkapan dan kevalidan data bahkan termasuk tingkat analisis penulisnya. Latar belakang pemikiran ini, menjadi dasar bagi penulis untuk membuat suatu catatan sejarah seperti yang ada sekarang. Sisi lain, penulisan ini hadir sebagai realisasi kerjasama Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan dan Tenggara dengan Pemda Tk.I Propinsi Sulawesi Selatan tahun 1993.

Penulisan sejarah, selalu diperhadapkan kepada perbedaan persepsi para sejarawan. Perbedaan itu utamanya menyangkut pendekatan dalam pemunculan kembali masa lampau. Suatu segi menginginkan pemunculan dan rekonstruksi masa lampau tersebut dengan format sejarah konvensional, sisi lain menginginkan rekonstruksi masa lampau dengan pendekatan multidisipliner. Penulis melihat, bahwa apapun bentuk pemunculan masa lampau itu, akan menempati peran dan fungsinya sesuai dengan keberadaannya, sepanjang penulisan itu selalu menempatkan masa lampau sebagaimana adanya.

Dalam pencarian data sejarahnya, sering diperdebatkan oleh para ahli, utamanya menyangkut sumber lisan dan tertulis. Bahan tertulis dianggap tidak dapat menerangkan keseluruhan fakta sejarah. Pendapat ini beralasan, bahwa dalam sumber tertulis ada makna tersembunyi dibelakang deretan kalimat yang tidak termaktub dalam tulisan. Sumber lisan dianggap, bahwa pengungkapan emosional dan subjektivitas pengkisahnya tidak dapat dihindarkan. Hal yang sama juga ditujukan pada sumber-sumber sejarah lisan.

Perbedaan persepsi tersebut, menunjukkan bahwa kritik sumber sangat dibutuhkan dalam pengungkapan masa lampau. Kritik itu sendiri tidak terbatas pada sumber, akan tetapi rekonstruksi masa lampau dan pandangan masa lampau perlu penempatan yang bijaksana.

Terlepas dari apa dan bagaimanapun pemunculan masa

lampau itu, kita dituntut suatu kesadaran bahwa sejarah bukanlah hanya sekedar fakta, kenyataan dan gagasan. akan tetapi juga menyangkut spirit, semangat dan penerusan kepribadian bangsa. Sejarah dianggap sebagai sarana pewarisan nilai dari generasi ke generasi.

Makassar, Agustus 1993

P e n u l i s

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

- I. Beberapa Catatan Tentang Kebudayaan dan Persepsi Sejarah di Makassar
- II. Kelahiran dan Pertumbuhan Kota Pantai Makassar
- III. Tahap Pertumbuhan Kota Pantai Makassar
- IV. Benturan-Benturan Budaya di Makassar
- V. Sejarah Politik (Political History) di Makassar
- VI. Tinjauan Akhir

Bibliografi

Lampiran

1. Skema Struktur Pemerintahan Kolonial
2. Skema Struktur Pemerintahan Tradisional
 - a. Bentuk kerajaan
 - b. Bentuk Komfederasi
3. Wilayah yang diperintah langsung oleh Hindia Belanda sejak 1824
4. Isi perjanjian Bongaya 1667/1824
5. Skema Tata Kota Somba Opu 1638
6. Makassar tahun 1693

BEBERAPA CATATAN TENTANG KEBUDAYAAN DAN PERSEPSI SEJARAH DI MAKASSAR

Berbicara tentang masa lampau masyarakat baik yang berorientasi pada kehidupan laut maupun yang berbasis kehidupan di pedalaman, merupakan tempat terjadinya proses sejarah. Sejarah menurut Huzinga adalah pertanggung jawaban kebudayaan tentang masa lalunya. F.H. Carr mengatakan, bahwa sejarah adalah dialog antara masa sekarang dengan masa lampau¹. Mattulada mengatakan, sesungguhnya kehidupan adalah pertemuan antara apa yang telah lampau dan harapan-harapan masa depan yang dipertemukan masa kini². Berdasarkan batasan-batasan tersebut, maka rekonstruksi masa lalu tentang pertumbuhan kota pantai Makassar merupakan pengungkapan tentang pertanggungjawaban kebudayaan masa lampau masyarakat Makassar. Pembuktian nyata tentang masa lampau terhadap kita akan menjadi harapan dan landasan untuk pemikiran ke masa depan.

Pengungkapan kembali tentang kehidupan masyarakat dan proses perkembangan kota, khususnya masyarakat dan kota pantai, berarti bahwa titik tolaknya adalah kehidupan komunitas yang berbasis kehidupan pada laut.

Menurut Djoko Surjo, secara ekonomis orientasi kegiatan kehidupan pada laut dapat diwujudkan dalam kaitan dengan kegiatan pelayaran dan perdagangan baik yang antar pulau maupun internasional³.

Kehidupan komunitas yang basis kehidupannya di laut, maupun di pedalaman, tidak terlepas dari wujud kebudayaan tentang; sistim religi, mata pencaharian, sistim kemasyarakatan, sistim teknologi dan aspek-aspek kehidupan yang lainnya.

¹Mestika Zeth, 1984. Pengantar Studi Historiografi. KSS Fakultas Sastra UNHAS Ujung Pandang 1988/1989. h.12

²Mattulada, 1982. Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah (1510-1700). Ujung Pandang : Bhakti Baru-Berita Utama, h.8

³Djoko Surjo, 1988. Pertumbuhan Kota-Kota Pantai Nusantara. Makalah seminar MSI di Ujung Pandang. h.2

Kebudayaan itu sendiri, berupa budaya atau hasil budaya fisik, dan budaya atau hasil budaya non fisik. Hal ini didasarkan pada pembagian wujud kebudayaan oleh Koentjaraningrat, bahwa :

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia⁴.

Harsya W. Bachtiar mengatakan, bahwa kebudayaan merupakan suatu sistem menyeluruh yang terdiri dari cara-cara dan aspek-aspek pemberian arti pada laku ujaran, laku ritual, dan berbagai jenis laku atau tindakan lain dari sejumlah manusia yang mengadakan tindakan antar satu dengan yang lainnya⁵.

Ini berarti pengungkapan kembali masa lampau tentang kelahiran dan pertumbuhan kota pantai Makassar, adalah berkisar pada aspek-aspek dan wujud kebudayaan tersebut. Aspek-aspek tersebut meliputi wujud kebudayaan non fisik seperti ide-ide, norma-norma, aktifitas serta tindakan dari manusia pendukungnya. Demikian pula wujud kebudayaan fisik berupa benda-benda hasil budaya atau hasil karya manusia secara kongkrit. Hasil-hasil budaya tersebut baik sebagai hasil konsep dan perilaku keagamaan, teknologi, perdagangan, termasuk sistem dan pola perdagangan (hubungan timbal balik).

Bertitik tolak pada wujud kebudayaan yang merupakan keseluruhan aspek-aspek kehidupan, maka persaksian masalampaupun akan demikian. Maksudnya bahwa penulisan sejarah pengorganisasian politik, sejarah ideologi atau agama serta tokoh-tokoh dianggap sebagai suatu penulisan sejarah yang tidak mampu menampilkan proses serta kejadian masa lampau secara utuh. Walaupun bukan

⁴Koentjaraningrat, 1985. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta : Aksara Baru, h.187

⁵Harsya W. Bachtiar, 1980. "Birokrasi dan Kebudayaan" dalam Analisis Kebudayaan. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan edisi tahun II, No.2 1981/1982, h.16

berarti sejarah dalam bentuk seperti itu tidak benar. Asumsi ini bertolak pada kecenderungan penulisan tersebut yang kurang melihat ke bawah, pengungkapan masa lampau secara kronologis serta melihat facts (kejadian-kejadian) sebagai suatu peristiwa tertentu. Dengan demikian masa lampau harus dilihat dari peristiwa tertentu. Masa lampau harus dilihat dari peristiwa (facts), fakta dan pendukung masa lampau itu sebagai suatu kesatuan yang menentukan proses sejarah.

Pendukung, fakta dan peristiwa sebagai manifestasi masa lampau adalah menyangkut kondisi geografis dan ekologis, adanya budaya sebagai fakta dan terjadinya peristiwa-peristiwa sebagai konsekwensinya. Keterkaitan antara ruang, fakta dan peristiwa tersebut, berjalan seiring dengan perubahan waktu, pada gilirannya akan muncul perubahan-perubahan sebagai akibatnya. Ini merupakan kejadian masa lampau secara keseluruhan.

Pertumbuhan Makassar sebagai sebuah kota pantai sebagai salah satu contoh kongkrit, yang proses sejarahnya tidak terlepas dari dukungan geografis dan ekologis, fakta-fakta (budaya) dan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh pendukungnya. Kondisi ruang (geografis dan ekologis) Makassar, selain kejayaan dan kebesaran Gowa, merupakan faktor pendukung yang sangat menentukan lahir dan tumbuhnya kota pantai Makassar. Lahirnya kota pantai Makassar sebagai hasil dari kondisi geografis dan ekologis, memungkinkan dan bahkan menentukan lahirnya kebudayaan-kebudayaan dari para pendukungnya.

Bersamaan dengan lahirnya kota dan komunitas pendukungnya serta datangnya berbagai macam bangsa dengan variasi kebudayaannya, dengan sendirinya akan terjadi dualisme budaya yang pada gilirannya akan terjadi benturan-benturan budaya dalam masyarakat. Benturan-benturan budaya itu sendiri memungkinkan lahir, hilang atau terbentuknya pola-pola budaya baru dalam masyarakat. Benturan budaya ini pula (konsep dan ide, norma-norma) memungkinkan terjadinya peristiwa - peristiwa (termasuk perang) sebagai konsekwensinya.

Benturan-benturan budaya seperti di atas, sesuai dengan

konsepsi Boeke; yang berpendapat bahwa untuk mempelajari masyarakat dualistis dengan berhasil, maka orang harus mencari bidang-bidang pergeserannya, menyoroti pertentangan antara kedua belah pihak dan menentukan dengan objektif hubungan masing-masing pihak di dalamnya⁶.

Selanjutnya Boeke berpendapat, bahwa munculnya suatu budaya (hasil budaya) di suatu daerah, maka harus diketahui bagaimana sehingga benda atau hasil budaya itu ada⁷.

Bertolak pada pengertian kebudayaan, wujud kebudayaan dan konsep tentang munculnya kebudayaan di suatu daerah dalam kaitannya dengan pertumbuhan kota pantai Makassar perlu pengkajian dan penelusuran secara cermat. Kalau demikian bagaimanakah dengan munculnya berbagai jenis keyakinan keagamaan di Makassar (dualisme agama). Bagaimanakah pola kehidupan dan budaya masyarakat kota pantai Makassar dengan datangnya berbagai macam suku bangsa, bangsa dengan pola kehidupannya masing-masing?

Pertanyaan selanjutnya bagaimanakah sejarah yang sebenarnya di Makassar pada kurun waktu abad 17 - 20 ?

Perlu penulis kemukakan, bahwa pendapat tentang periodisasi sejarah di Indonesia (termasuk Makassar) terdapat perbedaan pendapat para ahli. Di satu sisi berpendapat bahwa abad ke 18 adalah sejarah Kumpeni, sedangkan disisi lain berpendapat bahwa abad ke 17 dan 18 adalah sejarah Indoensia⁸. Pendapat pertama beralasan tentang penguasaan Kumpeni yang secara umum berlaku di Asia termasuk Indonesia, dengan penguasaan dan pendudukannya. Sedangkan pendapat kedua beralasan, bahwa pola-pola penguasaan dan

⁶J.H. Boeke dan D.H.Burger, 1975. *Ekonomi Dualistis: Dialog antara Boeke dan Burger*. Jakarta : Bhratara.h.23

⁷J.H. Boeke dan D.H. Burger, Ibid h.23

⁸G.H. Van Der Kolff, 1975. *Ekonomi Asli dan Asing*. Jakarta : Bhratara. h.36

perdagangan Kumpeni pada masa itu masih mengikuti pola-pola perdagangan tradisional yang di datangnya⁹. Analisa lain, bahwa kemampuan Makassar berperang dalam jangka waktu yang cukup lama (menurut penulis sejak abad ke 17 - 18), memberikan indikasi bahwa kemampuan ekonomi dan pertahanan orang-orang Makassar cukup kuat.

⁹J.C. Van Leur, 1971. Abad ke 18 Sebagai Kategori Dalam Penulisan Sejarah Indonesia. Jakarta : Bhratara, h.5-6

II

KELAHIRAN DAN PERTUMBUHAN KOTA PANTAI MAKASSAR

1. Pengertian kota/kota pantai

Apakah kota itu? definisi kota sendiri tidak terdapat kesepakatan diantara para ahli, bahkan setiap negara memberikan pengertian dan batasan yang berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut muncul sebagai akibat perbedaan sudut pandangnya. Perbedaan sudut pandang itu misalnya munculnya istilah kota perdagangan, kota pelabuhan, kota kerajaan, kota kolonial bahkan ada yang disebut sebagai kota upacara keagamaan¹. Terlepas dari jenis kota yang disebutkan di atas unsur utamanya adalah penduduk². Namun mengenai jumlah penduduk, juga belum ada yang memberikan batasan berapa jumlah penduduk pendukung suatu tempat yang dapat dikategorikan sebagai kota.

Namun demikian, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pembahasan kota pantai Makassar, penulis akan mengutip beberapa batasan pengertian kota.

Pengertian ideogram Mesir Kuno tentang "kota", yaitu sebuah bulatan dengan garis silang ditengahnya, seperti yang ditafsirkan oleh Robert S Lopez. Menurut beliau garis silang menunjukkan adanya titik temu jalan-jalan yang masuk dan keluar kota yang mengatur lalu lintas orang, barang dagangan dan juga gagasan-

¹Abdurrahman Surjomihardjo. "Rekonstruksi Sejarah Kota Melalui Perkembangan Tiga Jalur Pranata Sosial" dalam Ibrahim Alfian et.al. Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis. 1987. Jogjakarta : Gajah Mada University Press, h.262

²Ibid. h. 263

gagasan. Bulatan dalam gambar hieroglyph menunjukkan parit di keliling benteng atau tembok³.

Weber berpendapat, bahwa kota hanya berhubungan dengan penduduk lokal yang memenuhi sebagian besar dari kebutuhan ekonominya sehari-hari di pasar, barang-barang yang diperdagangkan tersebut adalah barang yang dihasilkan oleh penduduk setempat atau daerah terdekat, Jadi kota adalah tempat pasar⁴. Selanjutnya Sarotno Kartodirdjo et. al, mengatakan, bahwa perkataan nagari atau nagara dalam kitab Negara kertagama dapat diartikan sebagai kota yang meliputi kraton dan kompleks sekitarnya⁵.

Berdasarkan batasan-batasan tersebut di atas, maka kota itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu daerah dengan batas-batas tertentu. Apakah batas parit atau tembok seperti pada kota kerajaan atukah batas-batas administrasi/kekuasaan pada jaman kolonial dan modern, perhubungan yang lancar, adanya pasar serta dukungan penduduk yang cukup besar.

Sedangkan pengertian kota pantai seperti yang diungkapkan oleh Djoko Surjo bahwa kota pantai muncul sebagai imbalan atau konterpart dari adanya kota pedalaman. Kedua bentuk komunitas kehidupan tersebut dibedakan oleh komunitas pendukung, sistim kehidupan dan sosial budaya serta pola-pola hubungan masyarakat pendukungnya. Komunitas desa seperti yang telah diungkapkan oleh Paul H. Landis, bahwa komunitas desa secara statistik adalah yang berpenduduk kurang lebih 2500 orang. Masyarakat desa itu sendiri ditandai oleh pergaulan kehidupan keakraban dan keramah-tamahan yang meluas sekali. Beliau juga melihat bahwa kehidupan masyarakat desa itu didukung oleh sumber kehidupan yang berpusat pada pertanian,

³Ibrahim Alfian et.al (ed). Ibid. h. 263

⁴Max Weber. "The City" Collins Book, New York, N.Y. 1958
The Nature of the city, h. 76

⁵Sartono Kartodirdjo, et.al. 1975. Sejarah Nasional Indonesia.
Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. jld. III h. 149

peternakan dan perikanan⁶. Selanjutnya Sartono Kartodirdjo mengatakan, masyarakat desa adalah menunjuk kepada komunitas yang merupakan unit sosial ekonomis dan budaya, maupun kesatuan administrasi dan aparturnya⁷.

Bertolak pada pengertian kota, batasan tentang kota pantai yang dianggap sebagai imbalan kota pedalaman oleh Djoko Surjo⁸, maka disini dapat disimpulkan, bahwa kota pantai itu adalah kehidupan masyarakat pada suatu tempat dengan basis kehidupan pada perdagangan dan pelayaran. Kehidupan masyarakat tersebut didukung oleh sarana dan prasarana perhubungan (laut dan darat) serta munculnya sarana dan prasarana perekonomian seperti halnya pasar dan pelabuhan. Komunitas kehidupan dengan kompleksitas kehidupan itulah yang disebut sebagai kota (city, town). Tambahan lagi, bahwa masyarakat kota pola kehidupannya kebanyakan berkecimpung pada masalah kenegaraan, seperti pegawai dan kehidupan yang berkisar pada perdagangan.

Demikian juga halnya dengan "kota pantai Makassar" merupakan imbalan atau konterpart dari "kota pedalaman" yang dibedakan oleh kondisi geografis, komunitas pendukung, pola-pola hubungan dan kehidupan masyarakat serta struktur sosial budaya masyarakat pendukungnya. Penjelasan di muka telah menjelaskan bahwa kota pantai yakni yang berorientasi pada kehidupan laut dengan berbasis kehidupan pada pelayaran dan perdagangan. Disisi lain kota pedalaman adalah yang didukung oleh kehidupan masyarakat yang berorientasi di pedalaman dengan perhatian kehidupan masyarakatnya pada pertanian (agraris), peternakan dan perikanan.

⁶Soekandar Wiriaatmadja, et.al. Pokok-Pokok Sosiologi Pedesaan. Jakarta : CV. Yasaguna. 1986. cet. 13, h.7

⁷Sartono Kartodirdjo. 1988. Struktur Kekuasaan, Sistem Fiskal dan Perkembangan Pedesaan. Makalah. Jakarta : UI Press h.5

⁸Djoko Surjo. 1988. Pertumbuhan Kota-Kota Pantai Nusantara. Makalah Seminar MSI di Ujung Pandang, h. 3

“Kota pantai Makassar”, dengan kondisi geografis yang di dukung oleh laut, tidak akan terlepas dari kehidupan pelayaran dan perdagangan, disamping dukungan komunitas, sarana dan prasarana perhubungan laut dan darat serta munculnya pasar. Dukungan lain, bahwa lahirnya kota pantai Makassar sebagai pusat pemerintahan kerajaan Gowa dengan hubungan-hubungan keluar yang cukup luas. Kondisi seperti ini memungkinkan tumbuhnya Makassar sebagai sebuah kota pantai. Tambahan lagi, bahwa tumbuhnya Makassar sebagai sebuah kota pantai memungkinkan munculnya kompleksitas kehidupan yang mengarah pada pola-pola kehidupan yang bercirikan kota.

2. Lahirnya Kota Pantai Makassar

Lahirnya kota atau kota pantai pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut, antara lain faktor geografis dan ekologis, faktor politik, ekonomi, teknologi dan sosial budaya⁹. Sehubungan dengan lahirnya kota pantai Makassar, akan ditelusuri melalui faktor-faktor tersebut.

a. Faktor Geografis

Secara geografis, Makassar terletak pada hamparan Selat Makassar. Secara ekologis didukung oleh aliran sungai yang mengapit daratannya yakni Sungai Tallo di sebelah utara dan sungai Jeneberang di bahagian Selatan. Kondisi lain secara geo-historis adalah hamparan tanah daratan yang cukup subur.

Kondisi geografis Makassar yang terletak di mulut Selat Makassar, merupakan pendukung dan dasar lahirnya Makassar sebagai sebuah kota pantai. Keadaan seperti ini mengakibatkan mudahnya hubungan keluar masyarakat pendukung kota pantai Makassar melalui laut.

Adanya sungai yang mengapit daratan sebagai kondisi geografis, menjadi cikal bakal kota pantai Makassa. Namun keadaan seperti ini pula akan memberikan kemudahan-kemudahan untuk berhubungan

dengan daerah-daerah pedalaman sebagai pendukung dari segi lain.

Dukungan ini utamanya menyangkut hasil-hasil pertanian di pedalaman, yang pada akhirnya menjadi bahan-bahan dagangan bagi masyarakat diperkotaan. Ini berarti sungai disini utamanya berfungsi sebagai sarana perhubungan lokal sebelum adanya jalan darat (jalanan yang bisa dilalui kendaraan bermotor). Dukungan sungai disini baik dilihat dari segi politik, ekonomis (lokal), maupun dilihat dari segi pertumbuhan kota. Segi politis adalah sungai merupakan sarana perhubungan bagi masyarakat dan pemerintah kerajaan Gowa untuk berhubungan bagi masyarakat dan pemerintah kerajaan Gowa untuk berhubungan baik bilateral (antar kerajaan) maupun penguasaan. Penulis berasumsi bahwa sebelum adanya jalan darat, khususnya di kerajaan Gowa, sungai merupakan sarana perhubungan yang sangat penting. Pembuktian ini dapat dilihat pada adanya hubungan-hubungan dan penguasaan kerajaan Gowa di daerah pedalaman. Demikian juga hubungan-hubungan ke dalam misalnya antara kerajaan Tallo setelah pemisahannya¹⁰.

Kondisi geografis kota pantai Makassar sejak awal (Somba Opu), dengan peran sungai dan lautnya, memberikan kemungkinan-kemungkinan lancarnya perputaran ekonomi rakyat. Perputaran ekonomi ini utamanya menyangkut pertukaran (jual beli) antara masyarakat pedalaman dengan masyarakat pantai. Adanya hubungan timbal balik antara masyarakat pantai dengan masyarakat pedalaman memberikan alternatif lahirnya kota. Segi lain, lahirnya pusat pemerintahan, lahirnya tempat penukaran barang (pasar) khususnya di Somba Opu, mengakibatkan tumbuhnya kota pantai. Hubungan timbal balik antara faktor politik, ekonomi dan pertumbuhan kota merupakan kerangka dasar pertumbuhan kota pantai Makassar.

b. Faktor politik

Lahirnya kota pantai Makassar, secara politis tidak terlepas

¹⁰Abd. Razak Dg. Patunruk. Sejarah Gowa, 1983. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, h. 8

dari kebesaran kerajaan Gowa. Dengan dasar ini pula penulis melihat bahwa lahirnya kota pantai Makassar, diawali oleh perpindahan pusat kerajaan di Somba Opu. Pembangunan Benteng Somba Opu yang diprakarsai oleh raja Gowa ke IX Karaeng Tumpa'risi Kallonna dengan memakai tanah liat, kemudian dilanjutkan oleh raja berikutnya yakni raja Gowa ke X. Raja Gowa ke X inilah yang membangun Benteng Somba Opu dengan menggunakan batu bata¹¹, atau dapat dikatakan sebagai pemugaran untuk pertama kalinya Benteng Somba Opu tersebut. Lahirnya Benteng Somba Opu sebagai pusat kerajaan Gowa, merupakan awal dari pembentukan kota, yang berbasis kehidupan pada laut di Makassar. Fungsi Somba Opu sebagai pusat kerajaan atau pusat pemerintahan dengan hubungan-hubungan keluar termasuk hubungan bilateral, penguasaan dan hubungan perdagangan, memungkinkan sungai dan laut menjadi sarana transportasi semakin meningkat. Kondisi ini memungkinkan pusat kerajaan akan menjadi sentrum kegiatan pada segala aspek kehidupan. Bertolak pada konsepsi tentang kota oleh Ibrahim Alfian dianggap sebagai perkembangan tahap awal yakni berdirinya kompleks penguasa setempat dan jalan raya serta berdirinya kantor-kantor asing dan benteng-benteng¹². Berdirinya Benteng Somba Opu dengan kantor-kantor perwakilan dagang asing, berarti kondisi semacam ini mengarah pada pembentukan kota baru, dalam hal ini kota pantai Makassar.

Berkaitan dengan kondisi geografis, politis dan ekonomis, berdasarkan analisa di atas, pembentukan kota pantai Makassar bergeser sesuai dengan pergeseran pusat kerajaan sebagai sentrum kegiatan dan kehidupan masyarakat. Walaupun secara geografis pusat kerajaan Gowa Somba Opu pada masa-masa awal tidak termasuk pada daerah Makassar pada pergeseran tahap ke dua (Benteng Ujung Pandang), namun pembentukan dan pergeseran itu secara geo-politik lahir dari pergeseran tersebut. Maksudnya berdirinya Somba Opu

¹¹ Mattulada, 1982. Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah (1510-1700). Ujung Pandang : Bhakti Baru - Berita Utama, h. 14

¹² Ibrahim Alfian, et. al. 1987. Op. cit, h. 258

sebagai pusat kerajaan Gowa sejak raja Gowa ke IX dan bergesernya kota pantai Makassar sejak penguasaan Kolonial Belanda di Kompleks Benteng Ujung Pandang, dilatarbelakangi oleh berdirinya Gowa. Berarti secara politik pergeseran itu tidak akan terjadi tanpa adanya kerajaan Gowa. Dengan demikian kota pantai Makassar secara geopolitik, lahir dari pergeseran dan perubahan penguasa.

Sisi lain dari segi politik sebagai dasar terbentuknya kota pantai Makassar, adalah berdirinya kerajaan Tallo. Kerajaan Tallo yang berdiri sebagai sebuah kerajaan yang berotonomi dalam kerajaan Gowa. Kerajaan Tallo pada awal lahirnya dilatarbelakangi oleh adanya perselisihan antara kedua pangeran (anak raja Gowa Tunatangka Lopi) yakni Batara Gowa dan Karaeng LoE ri Sero. Dalam pertentangan itu Karaeng LoE ri Sero meninggalkan Gowa dan pergi ke Jawa. Setelah kembali dari Jawa, Karaeng LoE ri Sero tinggal di Pacci' nang, kemudian disarankan oleh Karaeng LoE ri Bira dan Karaeng LoE di Benteng untuk tinggal di kampung Batuwa yang berada di bawah kekuasaan Karaeng LoE ri Bira. Karaeng LoE ri Benteng dan Karaeng LoE ri Bira menyuruh rakyatnya untuk menebas hutan yang dinamai "Talloang" dekat sungai Tallo. Di daerah itu didirikan sebuah istana untuk Karaeng LoE ri Sero, yang kemudian dinamai "Tallo" dan Karaeng LoE ri Sero sebagai rajanya¹³.

Kalau pusat kerajaan Gowa-Tallo dilihat sebagai suatu kerajaan kembar, berarti pembentukan Somba Opu merupakan pusat kerajaan Gowa-Tallo. Dengan demikian berdirinya Somba Opu sebagai tahap awal terbentuknya Kota Pantai Makassar, secara politis lahir kota pantai yang memanjang dari Somba Opu sampai di Tallo.

Apabila kota pantai Makassar dilihat dari segi geografis, pada dasarnya terbentuk secara alami. Namun dari segi politik terbentuknya kota pantai Makassar sangat dipengaruhi oleh pergeseran pusat-pusat politik pada masanya. Hal ini terlihat pada perpindahan pusat-

¹³Abd. Razak Dg. Patunruk, 1983. Sejarah Gowa. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, h. 9

pusat perdagangan lautnya seperti lahirnya bandar atau pusat perdagangan di Barombong, yang kemudian digantikan oleh Vlaardingen setelah pergeseran itu di kompleks Benteng Ujung Pandang. Bandar dagang kerajaan Gowa Barombong berjaya pada masa pusat kerajaan berada di Somba Opu. Jatuhnya Somba Opu sebagai pusat kerajaan dan berpindahnya sublimasi kekuasaan pada pihak Belanda (sejak munculnya/ditandatangani perjanjian Bongaya)¹⁴, secara alamiah dan politik kota pantai Makassar bergeser secara geografis.

Pada aspek politik, munculnya pusat politik di Jumpandang¹⁵, memberikan hak-hak istimewa kepada penguasa dalam hal kebijaksanaan-kebijaksanaan. Kebijakan-kebijakan tersebut termasuk di dalamnya fungsi bandar, yang pada gilirannya akan membentuk kota pantai. Dalam posisi seperti ini penguasa dapat memaksakan kehendaknya (misalnya untuk singgah dibandar yang ada), demi kepentingannya.

Beberapa isi perjanjian Bongaya sebagai salah satu contoh.

- 2) Compangnia akan mendapat monopoli perdagangan
- 3) Orang-orang Portugis dan Inggris dilarang berdagang di Makassar
- 4) Orang Inggris yang barang-barangnya berada di Makassar harus diserahkan kepada Belanda
- 5) Compagnia dibebaskan dari cukai dan pajak pelabuhan

¹⁴Lihat isi perjanjian Bongaya, pasal 12, 22 Daud Limbugau. Terbentuknya Wilayah Administrasi pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan 1824-1874. h. 118-119

¹⁵Jumpandang yang dimaksudkan disini adalah tempat berdirinya Benteng Ujung Pandang, sebagai benteng pengawal bagi Benteng Somba Opu sebagai pusat pemerintahan Gowa. Sebagai realisasi dari perjanjian Bongaya Kompleks Benteng Ujung Pandang diduduki oleh Belanda dan menjadikannya sebagai pusat pemerintahan.

- 7) Semua hutang dan istana harus dihancurkan kecuali dua, satu untuk Belanda (benteng Ujung Pandang) dan satu untuk Sultan Hasanuddin (Benteng Somba Opu)¹⁶.

Penguasaan Benteng Ujung Pandang sebagai benteng pertahanan oleh Spelman (Belanda) menjadi peluang yang cukup besar tumbuhnya Kota Makassar sebagai kota dagang.

c. Faktor Ekonomi

Lahir, tumbuh dan berkembangnya kota Makassar, juga turut dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini baik yang bersumber pada komoditi lokal yang ada di pedalaman, maupun dari hasil pelayaran dan perdagangan. Komoditi lokal ini sendiri dapat didukung oleh kondisi geografis, yang mana daratan pendukungnya sangat cocok untuk pertanian. Daerah persawahan dan peladangan yang ada disekitar selat Makasar secara geografis dari arah barat "Maccini Sombala" sampai ke utara sungai Jene'berang dan sungai Tallo cukup baik. Ditambah lagi dengan hasil-hasil pertanian yang datang dari luar (daerah pedalaman).

Secara ekonomis masyarakat Makassar khususnya pada abad-abad ke 17 dan 18 mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup baik. Utamanya dilihat dari hasil-hasil pertaniannya seperti beras. Pembuktian ini dapat dilihat pada adanya eksport beras (diperdagangkan). Berarti bahwa disamping hasil tersebut untuk konsumsi sendiri, juga untuk kepentingan perdagangan. Seperti ditulis pada suatu tim penulisan tentang Makassar, yang mengatakan bahwa barang-barang yang diperdagangkan (dieksport) oleh orang Makassar yang abad ke 16 adalah beras dan sedikit emas¹⁷. Demikian juga halnya kalau kita melihat analisa Van Leur, yang mengatakan bahwa kemampuan

¹⁶Mattulada. Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah (1510-1700). 1982. Ujung Pandang : Bhakti Baru - BErita Utama, h. 87

¹⁷J.C. Van Leur. Abad ke 18 Sebagai Kategori Dalam Penulisan Sejarah Indonesia. Jakarta : Bhratara, h. 18 - 19

Makassar (raja-raja) berperang dalam jangka waktu lama/panjang (abad 17 dan 18), memberikan indikasi bahwa kemampuan ekonomi..... orang Makassar sangat kuat.

Dukungan timbal balik antara lahirnya kota, arus pelayaran dan jalur perdagangan, memungkinkan munculnya sarana ekonomi. Sarana-sarana ekonomi tersebut misalnya munculnya pasar, munculnya bandar-bandar sebagai tempat persinggahan bagi para pedagang dan lain-lain. Keterkaitan aspek-aspek ini pada gilirannya akan membentuk suatu kota pantai. Hal ini juga terjadi pada kota pantai Makassar yang lahir sebagai kota bandar, pelayaran dan perdagangan.

d. Faktor Teknologi

Lahirnya kota pantai, tidak akan terlepas dari tingkat kemampuan teknologi masyarakat pendukung kota pantai tersebut. Tingkat kemampuan teknologi, baik menyangkut tata ruang, bangunan fisik arsitektural bahkan termasuk tata guna tanah (penataan kota). Menyangkut tingkat kemampuan teknologi kota pantai Indonesia lama pada umumnya masih sederhana¹⁸.

Kelahiran kota pantai Makassar, terlepas dari teknologi tata ruang dan tata guna tanah, sangat didukung oleh teknologi transportasi laut. Teknologi transportasi laut di Sulawesi Selatan (termasuk Makassar) sudah dikenal sudah cukup lama (belum dapat ditentukan kapan mulai ada). Misalnya dapat dilihat pada pelayaran orang-orang Bugis Makassar pada abad-abad ke 13 (termasuk perantauan raja Tallo pertama ke Jawa). Penulis melihat, bahwa sarana transportasi yang dipergunakan tidak lain adalah perahu layar. Hal lain bahwa sejak abad ke 15 dan 16 pantai Barombong telah menjadi bandar internasional yang ramai. Daerah-daerah pelayaran orang Bugis Makassar pada masa itu, adalah Eropa dan Australia. Selanjutnya

¹⁸Djoko Surjo, 1988. Op. Cit, h. 5

¹⁹L. Tobing Cs. Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa. Ujung Pandang : Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, 1961. h. 19

oleh L. Tobing mengatakan bahwa sejak abad ke 17 daerah-daerah pelayaran orang Bugis (Wajo) sudah ada di kota Ambon, Banjarmasin, Maluku dan Djohor¹⁹. Persepsi penulis bahwa hal ini juga telah dilakukan oleh orang-orang Makassar.

Melihat rute pelayaran orang-orang Makassar diatas, menunjukkan bahwa teknologi transportasi laut orang Makassar cukup tinggi. Walaupun harus didukung oleh kondisi alam dan keterampilan tambahan misalnya mengetahui arah angin. Kemampuan teknologi ini ikut menentukan terbentuknya kota pantai Makassar. Terjadinya hubungan timbal balik, adanya bandar dan perdagangan memungkinkan lahirnya pemukiman-pemukiman para pendatang. Pusat-pusat pelayaran dan perdagangan berkembang dengan kompleksitas, penambahan komunitas dan metropolitan membentuk sebuah kota baru.

Pemanfaatan perahu layar tradisional Bugis Makassar (sebagai hasil budaya/tehnologi lokal/indigenius knowledge) berlangsung hingga pertengahan abad ke XIX. Hal ini dapat dilihat pada catatan perjalanan Josef Conrad, isinya :

Conrad yang di tahun 1887 mengadakan 5 perjalanan antara Singapura dan Kalimantan Timur, pada mana juga Dia mengunjungi Banjarmasin, Balikpapan, pulau laut dan Sulawesi Barat (Sulawesi Selatan sic) tidaklah dapat melihat kapal K.P.M., K.P.M. barulah didirikan pada tahun 1881 dan kapalnya yang pertama barulah berlayar pada tahun 1891²⁰.

Dengan demikian seiring dengan perubahan tingkat kemampuan teknologi khususnya teknologi transportasi laut, perkembangan kotapun semakin meningkat. Di kota pantai Makassar misalnya, bahwa sejak abad ke 19 dan 20 teknologi transportasi laut sudah mulai berkembang dengan adanya motorisasi.

²⁰Ibid. h. 15

²¹Tahap awal pembentukan kota menurut Ibrahim Alfian, yakni berdirinya pusat pemerintahan, berdirinya kantor-kantor asing (kantor-kantor perwakilan dagang asing) dan berdirinya benteng-benteng.

Tehnologi tata ruang, kalau pembangunan benteng apakah benteng dilihat dari fungsinya atautkah dilihat dari penempatan atau tata ruangnya, dianggap sebagai penataan awal sebuah kota²¹, maka kota pantai Makassar lahir dengan dukungan benteng. Berdirinya benteng-benteng pertahanan kerajaan Gowa-Tallo seperti Benteng Somba Opu, Benteng Garassi, Benteng Panakkukang dan Benteng Barombong di sebelah selatan dan di bagian utara benteng Ujung Pandang dan benteng Ujung Tanah²². Berarti kota pantai Makassar versi ini memanjang dari arah selatan benteng Garassi sampai arah utara benteng Ujung Tanah.

e. Faktor Budaya Masyarakat

Budaya seperti telah disebutkan di muka, terbagi atas tiga wujud yakni budaya sebagai wujud dari ide, perlakuan dan hasil-hasil budaya fisik. Faktor budaya dalam kaitannya dengan lahir dan berkembangnya kota pantai Makassar, pada hakekatnya berkisar pada tiga aspek atau wujud kebudayaan tersebut.

Dari segi ide dan perlakuan (fikiran yang abstrak) misalnya, berkaitan dengan pertumbuhan Makassar, dapat dilihat pada gambaran watak orang Gowa (Makassar). A.J. AF. Eerdmans menggambarkan bahwa orang Gowa suka bergembira, pemurah, suka menghargai tamu, patuh kepada orang yang ia percayai dan sukai, hormat kepada orang-orang tua dan cinta kepada anak-anak dan sebaliknya²³. Walaupun beliau memberikan gambaran yang sebaliknya dari watak tersebut di atas, namun penulis melihat bahwa watak atau karakteristik orang Gowa/Makassar tersebut sangat mendukung datang dan berdiamnya orang-orang asing di Makassar. Hal ini dapat dilihat pada diberikannya kesempatan untuk orang-orang asing membentuk perwakilan dagangnya di Makassar. Dengan dasar itu, sehingga orang-orang asing yang berada di Makassar sejak di Somba

²²Daud Limbugau, Op. Cit. h. 7

²³Abd. Razak Dg. Patunruk, Op. Cit. h. 143

Opu dan di sekitar Benteng Ujung Pandang, membuat perkampungan-perkampungan tersendiri. Seperti dikenalnya Vlaardigen atau "Kampong Balandaiya".

Demikian juga bangsa-bangsa asing lainnya, bahkan termasuk orang-orang yang berada di wilayah kerajaan Gowa sendiri pada masa itu. Contohnya dapat dilihat, adanya perkampungan-perkampungan orang Wajo, orang Bone (Bontoala) dan lain-lain daerah yang membentuk kelompok-kelompok tersendiri²⁴. Bahkan pada masa itu kesempatan untuk mendirikan rumah, kantor, gudang bagi portugis pada tahun 1615 di sekitar Benteng Ujung Pandang, Denmark pada tahun 1618, orang Aceh dan lain-lainnya²⁵.

Dalam hubungannya dengan budaya sebagai benda, maka hasil-hasil karya orang Makassar termasuk kerajinan tangan seperti kain selayar, gerabah lokal atau mata uang, alat-alat rumah tangga dan hasil-hasil budaya teknologi. Hasil-hasil budaya ini turut mempengaruhi terbentuknya kota pantai Makassar. Hal ini dimungkinkan karena adanya hubungan timbal balik dan munculnya transaksi perdagangan antar mereka. Sehingga pada gilirannya akan sampai pada pembentukan bangunan-bangunan sebagai pendukung fisik tata ruang kota pantai Makassar.

²⁴H.D. Mangemba. Nama "Makassar" atau "Ujung Pandang" Tinjauan dari Segi Sejarah. Prasaran yang diucapkan pada seminar "Makassar" pada tanggal 22 Maret 1981 di Hotel Raodah Makassar. h. 189.

²⁵A. Husain. et. al., 1956. Makassar Menuju Sosialisme. Makassar: Pemda Kodya Makassar, h. 79

BAB. III

TAHAP PERTUMBUHAN KOTA PANTAI MAKASSAR

A. Beberapa Persepsi Tentang Makassar

Pengertian tentang Makassar terdapat dua versi. Versi pertama melihat pembagian tersebut yakni Makassar sebagai grup etnis, Makassar sebagai sebuah kerajaan atas kerajaan Gowa - Tallo, dan Makassar sebagai ibu kota kerajaan¹. Versi lain tentang pengertian Makassar yang diungkapkan oleh Daud Limbugau dengan mengutip konsep pengertian Makassar menurut G.K. Andi Lolo yakni, Makassar sebagai suku (suku Makassar), Makassar sebagai nama kerajaan, Makassar sebagai selat (selat Makassar) dan Makassar dalam pengertian kota².

1. Makassar sebagai grup etnis

Pembagian Makassar berdasarkan grup etnis ini, adalah orang yang mendiami jazirah selatan pulau Sulawesi yang mem punyai adat-istiadat, karakter dan bentuk atau ciri tubuh tersendiri. Negeri-negeri yang termasuk dalam etnis tersebut meliputi: Maros, Gowa, Galesong, Takalar, Topejawa, Laikang, Cikoang, Jeneponto dan Bangkala. Mengenai orang Makassar seperti yang digambarkan oleh H.J. De Graaf, bahwa orang Makassar mempunyai perbedaan yang sangat lain dengan penduduk lainnya di kepulauan ini. Pada mereka terdapat empat macam lapisan masyarakat. Lapisan paling atas adalah raja dan sanak keluarganya, yang dapat menjadi pewaris kerajaan. Pada lapisan ini juga ditandai oleh pemilikan benda pusaka kerajaan. Dengan dasar ini pula, sehingga kewibawaan pemimpin

¹Mattulada. Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah (1510-1700). 1982. Ujung Pandang : Bhakti Baru - Berita Utama, h. 14-20

²Daud Limbugau. "Perjalanan Sejarah Kota Maritim Makassar Abad 19-20" dalam Mukhlis, ed. Persepsi Sejarah Kawasan Pantai. Ujung Pandang : P3 MP, h. 1-3

orang Makassar sangat dipengaruhi oleh pemilikan benda-benda pusaka. Lapisan kedua, adalah kelompok bangsawan lainnya. Lapisan ini ditempatkan pada posisi kedua berdasarkan keturunannya. Maksudnya struktur kebangsawannya tidak sama dengan bangsawan murni. Lapisan ketiga, adalah golongan orang kebanyakan atau lapisan Vrijen (= maradeka). Lapisan terakhir adalah golongan Slaven(ata). Pembagian pelapisan masyarakat Makassar oleh Friederich dalam tiga golongan, yakni golongan bangsawan, maradeka dan golongan ata.

2. Makassar sebagai sebutan atas kerajaan Gowa-Tallo

Dalam berbagai tulisan seperti artikel, laporan atau buku-buku utamanya yang ditulis oleh orang-orang asing, kerajaan Gowa-Tallo sering disebut sebagai kerajaan Makassar. Berdasarkan penamaan tersebut, maka sebutan Makassar bagi kedua kerajaan tersebut bisa dibenarkan.

3. Makassar sebagai ibu kota kerajaan

Ibu kota kerajaan Gowa sejak berdirinya telah mengalami dua kali perubahan tempat. Kedua ibu kota tersebut yakni Kale-Gowa dan Somba Opu. Ibu kota kerajaan Gowa yang pertama, adalah terletak di Kalegowa. Lokasi ibu kota kerajaan Gowa pertama itu disebut Tamalate yang sekarang ini merupakan tempat pemakaman raja-raja kerajaan Gowa. Selanjtnya pada masa raja Gowa yang ke IX Tumapa'risi Kallonna, ibu kota kerajaan Gowa pindah ke Somba Opu dengan didirikannya Benteng Somba Opu. Keberadaan Somba Opu disamping sebagai pusat pemerintahan, juga merupakan pelabuhan dan kota niaga pertama di kerajaan Gowa. Pada masa pemerintahan raja Gowa ke XIV Mangarangi Daeng Manrabbia Sultan Alauddin Tumenanga ri Gaukanna, ibu kota kerajaan Gowa kembali ke Kalegowa. Fungsi Kalegowa pada masa ini adalah sebagai pusat pemerintahan, sedangkan Somba Opu dijadikan sebagai kota raya yang melayani perniagaan dalam dan luar negeri. Somba Opu dan sekitarnya akhirnya bangkit menjadi bandar niaga yang diurus oleh seorang pejabat yang disebut Syahbandar³.

³Mukhlis, ed. Ibid. h. 3

4. Konsep pengertian Makassar yang lain berasal dari G.K. Andi Lolo yang menjelaskan sebagai berikut :
- a. Pengertian kultur antropoligis, Makassar adalah nama suku (suku Makassar) mendiami tanah di Jazirah terselatan dari pulau Sulawesi.
 - b. Pengertian politis historis, Makassar adalah nama kerajaan (kerajaan Makassar) yang diidentikkan dengan kerajaan Gowa-Tallo yang tumbuh sejak tahun 200 M. Kerajaan Makassar tergolong sebagai kerajaan Maritim yang pernah memegang hegemoni dan meliputi hampir seluruh Indonesia Timur.
 - c. Pengertian kota (kota Makassar) yakni kota yang terletak di tepi pantai selat Makassar bahagian selatan.
4. Menurut Sagimun M.D.⁴, sungguh tidak benar kalau pada abad ke-17 atau sebelumny ibu kota kerajaan Gowa adalah Makassar. Di abad ke-17 hanya dikenal dengan adanya kerajaan Gowa dengan ibu kota Somba Opu dan pelabuhannya juga disebut Somba Opu. Menurut beliau nanti setelah Somba Opu dihancurkan oleh Belanda (VOC) barulah kota Makassar yang sekarang namanya sudah diganti menjadi Ujung Pandang mulai berperan. Pendapat ini menurut penulis, bahwa kalau nama Makassar dianggap sebagai menunjukkan nama kota niaga dan pelabuhan, maka baik Somba Opu maupun Ujung Pandang (Vlardingén) pada masa penguasaan Kolonial Belanda, juga dapat digolongkan dalam kategori Makassar. Hal ini didasarkan pada fungsi dan peran pelabuhan tersebut. Tambahan lagi, bahwa dengan peran pelabuhan sebagai kota niaga dan kota pelabuhan, sehingga para pedagang dan pelayar asing menyebutnya sebagai pelabuhan Makassar. Namun, dari segi tata fisik pelabuhannya dengan sendirinya tidak akan sama pada saat pelabuhan tersebut di Somba Opu (Barombong) dengan pelabuhan yang berada di kompleks Benteng Ujung Pandang (Vlardingén).

5. Di dalam arsip-arsip atau dokumen laporan Kolonial, sangat jelas berfungsi sebagai pusat pemerintahan Gouvernemet Celebes en Onderhorigeden. Sejak penguasaan Pemerintahan Hindia Belanda 1824 telah memakai nama Makassar sebagai tempat atau alamat surat-surat resminya. Selain itu, di dalam wilayah Gouvernemet Celebes en Onderhorigen Makassar berstatus bahagian dari wilayah itu sebagai Distrik atau Afdeling. Diantara Distrik/Afdeling yang pernah ada, termasuk didalamnya distrik/afdeling Makassar. Dengan dasar itu, maka menurut Daud Limbugau, bahwa sejak pemerintahan Hindia Belanda Makassar secara resmi di fungsikan sebagai pusat pemerintahan, kota niaga dan kota pelabuhan⁵.

B. Periodisasi pertumbuhan kota pantai Makassar

Pertumbuhan kota pantai Makassar pada dasarnya ditentukan oleh aspek-aspek politik, dan zone-zone pelayaran dan perdagangan atau pola-pola hubungan keluar. Aspek-aspek di atas mengakibatkan munculnya perubahan-perubahan status kota, misalnya dari kota kecil sampai pada status kota besar. Namun demikian bahwa pembatasan antara kota kecil dan kota besar masih tertumpu pada aspek komunitas pendukungnya serta perlakuan hidup dari masyarakat pendukungnya.

Pertumbuhan kota pantai Makassar demikian pula halnya. Maksudnya bahwa tahap-tahap pertumbuhan serta pergeseran-pergeserannya sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek di atas. Sehingga dalam perubahan-perubahan status kota pantai Makassar penulis melihat dari tiga tahap pertumbuhan.

Tahap pertama, yakni sejak terbentuknya Bandar Barombong (Somba Opu) sebagai pusat kerajaan Gowa dan sekaligus sebagai kota dagang Internasional⁶. Ini berarti bahwa sejak Somba Opu

⁵Mukhlis, ed. Ibid, h. 4-5

⁶Menurut H.D. Mangemba, bahwa sejak 1538 orang Portugis sampai di Makassar dan membentuk pemukiman disekitar Bandar. Pembentukan lokasi pemukiman orang-orang Portugis tersebut, mengakibatkan berlangsungnya hubungan dagang yang harmonis.

berdiri sebagai pusat kerajaan, maka kota pantai Makassar pada dasarnya sudah mulai terbentuk. Pertumbuhan awal ini di dukung oleh zone-zone perdagangan Nusantara (tradisional) dan zone-zone perdagangan Internasional. Apabila hal ini dilihat dari segi waktu, maka pertumbuhan tahap awal ini terjadi pada sekitar abad ke 16, yakni pada masa pemerintahan raja Gowa ke IX Karaeng Tumapa'risi Kallonna (1543).

Pertumbuhan tahap ke II, yakni sejak pergeseran dan berdirinya Bandar dan perkampungan di sekitar Benteng Ujung Pandang. Dikuasainya Benteng Ujung Pandang oleh Hindia Belanda, kemudian diikuti oleh terbentuknya pemukiman orang-orang asing seperti Belanda, Inggris, Denmark, termasuk Asia Timur Jauh disamping perkampungan-perkampungan orang-orang Bugis (Bone dan Wajo)⁷. Pergeseran ini berawal dari runtuhnya Istana Gowa Somba Opu. Runtuhnya Somba Opu sebagai pusat kerajaan secara politis adalah kekalahan Gowa (tidak mutlak), namun pemerintah Gowa masih tetap berjalan bersamaan dengan pemerintahan Belanda. Pertumbuhan tahap ke dua ini berlangsung pada kurun waktu yang cukup lama, yakni berlangsung sampai pertengahan abad ke XX.

Pertumbuhan tahap ke tiga, menurut penulis sebagai tahap perkembangan, yakni sejak penguasaan dan penataan kota pantai Makassar berada di tangan orang-orang pribumi. Perkembangan ini dilihat dari penanganan dan penataannya yang kemudian berkembang menjadi pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat pemerintahan sampai pada perkembangan di saat sekarang⁸.

⁷A. Husain dkk. 1956. Makassar Menuju Sosialisme. Makassar: Pemda Kodya Makassar, h. 46-49

⁸Walaupun nama "Makassar" tidak berlangsung sampai sekarang, penulis melihat perkembangan ini, tanpa melihat perbedaan persepsi tentang nama "Makassar" dan "Ujung Pandang".

C. Pengaruh Aspek Politik dan Zone-Zone Perdagangan

Pertumbuhan tahap awal kota pantai Makassar yang pada masa itu masih di Somba Opu, didukung oleh berdirinya kerajaan Gowa sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat. Pengaruh ini terutama dari hubungan-hubungan Gowa dengan daerah-daerah lainnya. Seperti terlihat pada tulisan Armando Costesao mengenai catatan perjalanan Tome Pires "Sumadriental" dalam tahun 1513. Dalam catatan perjalanan Tome Pires ini dijelaskan mengenai perdagangan orang-orang Makassar ke Malaka, Jawa, Borneo, Siam dan semua negeri antara Pahan dan Siam⁹. Zone-Zone pelayaran ini merupakan zone perdagangan tradisional orang Makassar arah barat. Sedangkan zone pelayaran ke arah timur yakni daerah Pegu, Maluku, dan Banda. Di sini terlihat bahwa lahirnya kota pantai Makassar sejak awal didukung oleh sublimasi Gowa sebagai sebuah kerajaan dan jalur Perdagangan lokal, Nusantara dan Internasional. Karena dengan demikian Makassar yang kala itu Somba Opu menjadi sebuah bandar niaga dan pusat perdagangan. Ini memungkinkan terbentuknya kota dengan komunitas, sistem kehidupan dan pola-pola hubungan yang sangat kompleks.

Segi lain, bahwa sejak jatuhnya Malaka pada tahun 1511, maka dengan sendirinya pusat-pusat perdagangan beralih ke Nusantara. Kondisi ini memungkinkan tumbuhnya Makassar sebagai kota dagang, bandar dan transit/persinggahar lari para pedagang asing. Walaupun pada saat itu perdagangan dan pelayaran didominasi oleh orang-orang Aceh, Jawa dan Johor. Pergeseran ini berlangsung sampai pada tahun 1625 (abad 17). Sejak saat ini, Makassar menjadi pusat perdagangan dan pelayaran rempah-rempah, yang didukung oleh letak geografis. Hal mana bahwa Makassar berada pada jalur lintas antara pelayaran arah barat dan arah timur.

Pertumbuhan kota pantai Makassar tahap ke II, berawal dari pergeseran pusat-pusat perdagangan. Pergeseran tersebut mulai dari

⁹Mattulada, Op. Cit. h. 9

C. Pengaruh Aspek Politik dan Zone-Zone Perdagangan

Pertumbuhan tahap awal kota pantai Makassar yang pada masa itu masih di Somba Opu, didukung oleh berdirinya kerajaan Gowa sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat. Pengaruh ini terutama dari hubungan-hubungan Gowa dengan daerah-daerah lainnya. Seperti terlihat pada tulisan Armando Costesao mengenai catatan perjalanan Tome Pires "Sumadriental" dalam tahun 1513. Dalam catatan perjalanan Tome Pires ini dijelaskan mengenai perdagangan orang-orang Makassar ke Malaka, Jawa, Borneo, Siam dan semua negeri antara Pahan dan Siam⁹. Zone-Zone pelayaran ini merupakan zone perdagangan tradisional orang Makassar arah barat. Sedangkan zone pelayaran ke arah timur yakni daerah Pegu, Maluku, dan Banda. Di sini terlihat bahwa lahirnya kota pantai Makassar sejak awal didukung oleh sublimasi Gowa sebagai sebuah kerajaan dan jalur Perdagangan lokal, Nusantara dan Internasional. Karena dengan demikian Makassar yang kala itu Somba Opu menjadi sebuah bandar niaga dan pusat perdagangan. Ini memungkinkan terbentuknya kota dengan komunitas, sistem kehidupan dan pola-pola hubungan yang sangat kompleks.

Segi lain, bahwa sejak jatuhnya Malaka pada tahun 1511, maka dengan sendirinya pusat-pusat perdagangan beralih ke Nusantara. Kondisi ini memungkinkan tumbuhnya Makassar sebagai kota dagang, bandar dan transit/persinggahar lari para pedagang asing. Walaupun pada saat itu perdagangan dan pelayaran didominasi oleh orang-orang Aceh, Jawa dan Johor. Pergeseran ini berlangsung sampai pada tahun 1625 (abad 17). Sejak saat ini, Makassar menjadi pusat perdagangan dan pelayaran rempah-rempah, yang didukung oleh letak geografis. Hal mana bahwa Makassar berada pada jalur lintas antara pelayaran arah barat dan arah timur.

Pertumbuhan kota pantai Makassar tahap ke II, berawal dari pergeseran pusat-pusat perdagangan. Pergeseran tersebut mulai dari

⁹Mattulada, Op. Cit. h. 9

Dalam masa perkembangan tahap ke II ini, kota pantai Makassar tetap berfungsi sebagai bandar dagang dan pelayaran. Namun demikian, sistem dan pola operasionalnya berbeda dari format atau kebijakan-kebijakan sebelumnya. Hal nyata dapat dilihat pada unsur-unsur monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Belanda (VOC). Dalam menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah oleh Prof. Dr. Mattulada, dijelaskan bahwa :

Lambat laun getaran Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam) yang dinamakan Belanda Stad Vlaardingen menjadi ramai oleh sekutu-sekutu Belanda yang terdiri dari sekian banyaknya suku bangsa. Ujung Pandang menjadi pusat kekuasaan dan Vlaardingen menjadi bandar niaga yang menggantikan Somba Opu¹².

Segi tata kota pantai Makassar pada perkembangan tahap ke II ini, didukung oleh munculnya pemukiman-pemukiman bangsa asing seperti Melayu dan adanya perkampungan orang-orang Bugis. Tata fisik kota pantai seperti ini seperti adanya bangunan-bangunan perwakilan dagang dan istana (seperti istana Arung Palakka). Dengan demikian dukungan komunitas, tata ruang atau arsitektur bangunan fisik itu sendiri memberikan corak baru. Corak baru ini merupakan pertumbuhan kota pantai yang didukung oleh kondisi politik. Jadi pertumbuhan kota pantai Makassar pada tahap ke II ini sangat dipengaruhi oleh pusat politik yang diperkuat oleh kondisi geografis yang cukup baik.

Zone-zone perdagangan pada pertumbuhan tahap ke dua, pada dasarnya belum mengalami perubahan-perubahan rute pelayaran yang mendasar. Rute pelayaran lokal, Nusantara dan Internasional masih tetap berjalan termasuk rute-rute awal dimana Somba Opu sebagai Bandar. Rute pelayaran tersebut yakni Eropa, Arabia, India dan benua-benua yang lainnya¹³. Rute pelayaran orang Makassar

¹²Mattulada. Op. Cit, h. 95 .

¹³PH. O.L. Tobing, cs. Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa. Ujung Pandang : Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara Makassar, 1961. h. 19

sejak pertumbuhan tahap ke dua kota pantai Makassar, sejak tahun 1667 menurut Edward L Polinggomang, adalah jalur utara Pilipina, Jepang dan Cina. Jalur Timur Maluku dan Irian Jaya, Jalur selatan adalah Nusa Tenggara dan Australia dan jalur barat adalah Kalimantan, Malaka, Sumatra, Jawa, Asia Selatan juga Eropa¹⁴. Analisa di atas sesuai dengan pendapat W.Ph. Coolhoas, bahwa hubungan antara Sulawesi Selatan dengan Australia Utara, yaitu pada pertengahan abad ke 17¹⁵. Pelayaran orang Makassar dan Bugis menggunakan angin musim barat laut (pergi) dan permulaan angin musim tenggara (pulang) pada tahun 1768, telah sampai di New-Holland. Menurut analisa Coolhaas, pelayaran dengan perahu Padewakkang tersebut kemungkinan besar ke teluk Carpentaria untuk mengumpulkan tripang, yang kemudian dijual kepada perahu Djung Cina yang setiap tahun datang ke Makassar. Sehubungan dengan rute pelayaran orang-orang Makassar ke Australia Utara, berikut rute pelayaran tersebut menurut hasil penelitian Cense¹⁶.

Rute Pelayaran Orang Bugis Makassar ke Pelabuhan Darwin dan Pantai Utara Australia.

Makassar, Seleier, Wetar (Mak. Etara'), Kisar (Mak. Gesere') Leti, Moa, selanjutnya ke arah Selatan-Tenggara ke pelabuhan Darwin lalu ke arah timur ke Lembang Lantang atau "Teluk Dalam" ke Karaeng Mangngemba, ke Lembana I Ma'ne' atau "Teluk Ma'ne'", ke Lemba Kusissili atau "Teluk Nyamuk". Dari teluk Nyamuk ke Lemba Peo' atau "Teluk Lampur" terus ke Lemba Binangaja atau "Teluk Sungai". Dari Teluk Sungai ke Lemba Muttiaraja atau

¹⁴Edward L. Polinggomang, 1992. *Proteksi dan Perdagangan Bebas : Makassar pada Abad kesembilanbelas*. Makalah Seminar Fakultas Sastra UNHAS 4 Maret 1992 di Ujung Pandang, h. 1

¹⁵A.A. Cense dan H.J.Heeren, 1972. *Pelayaran dan Pengaruh Kebudayaan Makassar - Bugis di Pantai Utara Australia*. Jakarta : Bhratara, h. 10

¹⁶Rute Pelayaran ini menurut kisah Daeng Sarro Kp. Bontorannu dekat Makassar.

“Teluk Mutiara” sambil berlayar mereka sampai ke tempat-tempat berikut yang masing-masing jauhnya setengah hari berlayar yakni Pa’banderanga atau “Tempat Bendera”, Anggarisi’ to aya atau “Orang Inggris Tua” dan Tarrusanga atau “Selat”.

Dari Tarrusanga orang harus berlayar tiga jam untuk sampai di ujung Garonggong. Jarak antara tempat-tempat berikutnya tidak diberitakan, jarak antara tempat-tempat itu antara beberapa jam sampai sehari pelayaran; Lembana i Jawa atau “Teluk Jawa”, Lembana Sialloa atau “Teluk Sehari”, Liukang Kangkonga atau “Pulau Kangkung”. Dari Teluk Kangkung ke arah Selatan Tenggara ke Kampena i Panjang atau “Teluk Panjang”, Waira, Pua’ Rengga’, sebuah tempat yang banyak penduduknya. Dari Pua’ Rengga, kemudian tiba di Morongga ke sebuah selat Salla’ Labua atau “Selat Panjang”, disebelah kanannya Lembana Tudea atau Teluk Lakon dan disebelah kirinya Takkerena. Setelah melalui Selat itu, mereka tiba di Pulau Tjampalea (Tjampalea dalam bahasa Makassar adalah sejenis kerang) di mana terdapat Penyu kemudian tiba di Kulira terus ke arah Timur; Pulau Parku dalam bahasa Makassar disebut Pua’ Duda sebuah perkampungan besar Manunu, tempat berdagang dengan orang Marege’ dan menukar tembakau dengan minuman keras dengan Penyu (karet), Batu Mustika (Mak. Kulau), kulit mutiara (Mak. Kuli’ Muttiaira) dan tanduk. Dalam pelayaran tersebut, kemudian mereka tiba di Lembana i Ru’ku’ atau “Teluk Ru’ku’”, kemudian ke Manjarranga (Mak. Lembana Panrea) atau “Teluk Pandai Besi” (Panre dalam bahasa Makassar juga dapat diartikan tukang kayu). Disekitar itu terletak pulau-pulau Liukang Paramataja atau “Pulu Batu Permata”, Liukang Pullando atau “Pulau Kancil”, Namboa “het Zwin” (muara yang penuh pasir), Pulau Karang Togo Togo Sombala”, Liukang Pempeng atau “Pulau Rangkap” dan pulau Karang Tambitjina.

Pelayaran tersebut dilanjutkan ke arah Selatan mereka tiba di daerah Bapa’ Pi’ dan didekatnya Kormar, kemudian Lembana i Bapa’ atau “Teluk Bapa’” dengan “Karkar (a) nga. Disini terdapat sebuah pulau Pattannangngang Ballua atau tempat dimana tempat masak didirikan. Di Lembana Karaeng Manggelai atau “Teluk Karaeng Manggelai” yang letaknya lebih jauh ke arah Selatan. Disini terdapat perkampungan Camba Lompoa atau Pohon Asem

Besar, Kampong Renggang (nama sebuah kampung di Makassar). Juga orang mengumpul tripang di suatu tempat yang bernama Biring Temboka atau "Pinggir Tembok" dan yang letaknya di Lemba i Jawa atau "Teluk Jawa" lalu ke Pulau Daeng Muntu'. Lebih jauh ke arah Selatan perkampungan Bapa' Paso' dan didekatnya Lemba Berua atau "Teluk Baru" dan sebuah sempitan laut. Selanjutnya perkampungan Guru Le'leng atau "Guru Hitam", pulau Batjo Oni', Batu Lompoa, atau Batu Besar, perkampungan Waripa dan Lemba Bingkurua atau "Teluk Bengkudu", tempat dimana ayah Daeng Sarro dimakamkan. Tak jauh dari situ Liukang Racunga atau "Pulau Racun" lebih ke arah Timur terdapat Lembana i Mangko' atau "Teluk Mangko'" dan sebuah pulau Pattannangngang Pallu Toaja atau "Tempat Masak yang Tua". Lalu menuju ke arah Utara akan tiba di Salla' Pancana atau "Selat Pantjana" yang kaya akan tripang. Kemudian tiba ditempat-tempat Sossonga, Ma' k antjapa', Tjarapi', pulau Karang Nalia dan Aroro, pulau-pulau Wanda Maje, Warpulmaje dan Iningalkumaje dan lembe Mangiwang atau "Teluk ikan Hiu" dengan dangkalan pasir yang banyak terdapat tripang yang besar-besar, dari sana sambil berlayar ke arah Selatan, akan tiba di Lemba Kurotong atau "Teluk Kurotong" (Kurotong sejenis ikan yang berbintik-bintik hitam), lalu terdapat pulau Daeng Lompo dengan tempat-tempat Kare' Bilu'.

Pendapat lain tentang rute pelayaran orang Bugis Makassar ke Pantai Utara Australia, seperti yang diungkapkan oleh W.Ph. Coolhaas, dalam karangannya "Pelayaran Perahu Makassar-Bugis ke Australia Utara". Dengan mengutip pendapat A.A. Cense menyebutkan, bahwa berita tertua yang diketahuinya tentang pelayaran orang-orang Indonesia ke Australia, adalah sebuah catatan Alexander Dalrymple dari tahun 1768. Keterangan tersebut berdasarkan surat dari Gubernur Jenderal dan anggota-anggota Dewan yang ditujukan kepada Heren XVII tertanggal 19 Januari 1654, beliau berpendapat tentang adanya hubungan yang terjadi jauh lebih awal. Kira-kira pada tahun 1645 orang-orang Belanda menemukan, bahwa orang-orang Makassar agak sering juga datang di pulau-pulau yang letaknya disebelah Tenggara, Selatan dan Timur pulau Banda untuk berdagang, hal ini untuk pembesar-pembesar Batavia dan di Banda merupakan

suatu alasan untuk lebih banyak menaruh perhatian atas pulau-pulau tersebut daripada yang sudah-sudah. Akibatnya ialah dibuka suatu kantor Cabang di Damar. Dalam surat tersebut (Algement Rij, sarchief Kol. Arch, berkas 1087, folio 65), maka diberitakan bahwa dalam tahun 1653 dikepulauan Sula, De Flaming Van Oudtshoorn yang terkenal itu, telah mendengar, bahwa di balik Damme, masih terletak banyak pulau-pulau besar, mana beberapa buah yang sebesar pulau Bouro dan ada yang lebih besar lagi, yang menghasilkan budak-budak belian, lilin, kulit penyu dan lain-lain, yang tiap-tiap tahun dikunjungi oleh orang-orang Makassar. Berdasarkan data-data dan fakta tersebut, bahwa pulau yang dimaksudkan tersebut adalah pulau-pulau yang merupakan bagian daripada pantai Australia-Utara.

Jalur utara pelayaran orang-orang Makassar seperti ke Singapura dan jalur barat seperti ke Kalimantan pada pertengahan abad ke XIX menunjukkan perkembangan yang cukup besar. Untuk hal ini, dapat dilihat pada banyaknya pelayar dan pedagang yang berasal dari Makassar datang ke Kutai pada tahun 1850. Analisa Cense mengatakan, bahwa di Kutai terdapat empatpuluh buah perahu besar, yang sebagian besar berasal dari Sulawesi, tetapi biasanya berpangkalan di Samarinda. Pedagang-pedagang ini langsung berhubungan dengan Pasir, Berau, Solok, Mangindanao, Sulawesi, Singapura, Bali, Jawa dan daerah-daerah sekitarnya¹⁷.

Pada kurun waktu ini, yakni tahun 1846, kota pelabuhan Makassar menurut Analisa Edward L. Polinggimang, sebagai masa kemerosotan dan bahkan dipandang hampir mencapai titik kesunyian¹⁸. Hal ini menurut beliau sebagai akibat dari monopoli

¹⁷J. Zwager. "Kerajaan Kutai di Pesisir Timur Kalimantan dan Hal Ikhwalnya Dalam Tahun 1853" Dalam Taufik Abdullah, ed. 1985. *Sejarah Lokal di Indonesia Kumpulan Tulisan*. Jogjakarta : Gajah Mada University Press. h. 133.

¹⁸Edward L. Polinggomang, 1992. *Op. Cit.* h. 1

Hindia Belanda dan terbukanya perdagangan bebas di Singapura. Lahirnya dua bentuk persaingan dagang pada dua daerah atau pelabuhan yang saling berhubungan, mengakibatkan munculnya kemajuan dan kemerosotan salah satu pihak. Pembelian atau penampungan barang-barang dagangan oleh satu pihak (dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda), mengakibatkan munculnya kekecewaan para pedagang yang datang dari luar. Kondisi ini memberikan peluang kepada pemerintah (dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda) untuk menentukan harga sesuai dengan keinginannya tanpa melihat aspek-aspek lainnya. Dengan demikian para pedagang sulit untuk menentukan harga dan bahkan penyaluran barang-barangnya pun semakin sulit walaupun harga yang ditentukan tidak sesuai dengan barang-barangnya.

Rute pelayaran, zone-zone perdagangan, pusat politik dan letak geografis seperti di atas sangat mempengaruhi pertumbuhan kota pantai Makassar tahap ke dua. Pasang surut pelayaran, perdagangan dan perubahan-perubahan kondisi politik sejak penandatanganan perjanjian Bongaya, mewarnai pertumbuhan kota Pantai Makassar sampai pada pertengahan abad ke XX.

Pasang surut perdagangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan jalur pelayaran, sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kota, termasuk kota pantai Makassar. Pengaruh timbal balik ini muncul sebagai konsekuensi tinggal dan bahkan didirikannya kantor-kantor dagang.

Keterkaitan antara rute pelayaran, zone-zone perdagangan termasuk sistem perdagangan di Makassar sejak berdirinya pada tahap kedua (Benteng Ujung Pandang dengan Vlardingennya), menandai pertumbuhan kota selanjutnya. Perkembangan ini memberikan predikat baru bagi kota pantai Makassar, sehingga dari segi tata hukum peningkatan status kotapun ikut berubah. Perkembangan tata kota, kemapanan politik dan kemampuan ekonomi, menempatkan status kota yang penulis sebut sebagai perkembangan tahap ke-tiga atau tahap perkembangan kota. Perkembangan tahap ini, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 1964 (LN. 1964 No. 94) sebagai dasar dan sarana hukum penetapannya, dengan menempatkan

Hindia Belanda dan terbukanya perdagangan bebas di Singapura. Lahirnya dua bentuk persaingan dagang pada dua daerah atau pelabuhan yang saling berhubungan, mengakibatkan munculnya kemajuan dan kemerosotan salah satu pihak. Pembelian atau penampungan barang-barang dagangan oleh satu pihak (dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda), mengakibatkan munculnya kekecewaan para pedagang yang datang dari luar. Kondisi ini memberikan peluang kepada pemerintah (dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda) untuk menentukan harga sesuai dengan keinginannya tanpa melihat aspek-aspek lainnya. Dengan demikian para pedagang sulit untuk menentukan harga dan bahkan penyaluran barang-barangnya pun semakin sulit walaupun harga yang ditentukan tidak sesuai dengan barang-barangnya.

Rute pelayaran, zone-zone perdagangan, pusat politik dan letak geografis seperti di atas sangat mempengaruhi pertumbuhan kota pantai Makassar tahap ke dua. Pasang surut pelayaran, perdagangan dan perubahan-perubahan kondisi politik sejak penandatanganan perjanjian Bongaya, mewarnai pertumbuhan kota Pantai Makassar sampai pada pertengahan abad ke XX.

Pasang surut perdagangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan jalur pelayaran, sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kota, termasuk kota pantai Makassar. Pengaruh timbal balik ini muncul sebagai konsekuensi tinggal dan bahkan didirikannya kantor-kantor dagang.

Keterkaitan antara rute pelayaran, zone-zone perdagangan termasuk sistem perdagangan di Makassar sejak berdirinya pada tahap kedua (Benteng Ujung Pandang dengan Vlardingennya), menandai pertumbuhan kota selanjutnya. Perkembangan ini memberikan predikat baru bagi kota pantai Makassar, sehingga dari segi tata hukum peningkatan status kotapun ikut berubah. Perkembangan tata kota, kemapanan politik dan kemampuan ekonomi, menempatkan status kota yang penulis sebut sebagai perkembangan tahap ke-tiga atau tahap perkembangan kota. Perkembangan tahap ini, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 1964 (LN. 1964 No. 94) sebagai dasar dan sarana hukum penetapannya, dengan menempatkan

pemerintahan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan yakni di Kota Makassar. Selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah pasal 3 PP No.51 tahun 1971 menetapkan dan mengganti Makassar menjadi Ujung Pandang¹⁹. Berdasarkan perubahan di atas, Ujung Pandang dirubah menjadi Kotamadya Ujung Pandang yang berlangsung sampai sekarang.

¹⁹H.D. Mangemba. 1981. Nama "Makassar" atau "Ujung Pandang". Tinjauan dari segi Sejarah. Prasaran pada seminar "Makassar" tanggal 22 Maret 1981 di Hotel Raodah Ujung Pandang, h. 30/198.

LAUT ARAFURU

LAUT TIMOR

Tel. Dundas
 p. Melville
 Cockburn S
 Sel Anseley
 p. Bathurst
 Pel. Darwin
 Tel. London
 Tel. Van Sittart
 p. Cassini

TELUK VAN DIEMEN

Sel. Macquarie
 p. Goulburn
 p. Sime
 Tel. Stuart
 p. Crocodile
 p. Elcho
 p. English Co
 p. May Road

ARNHEM LAND

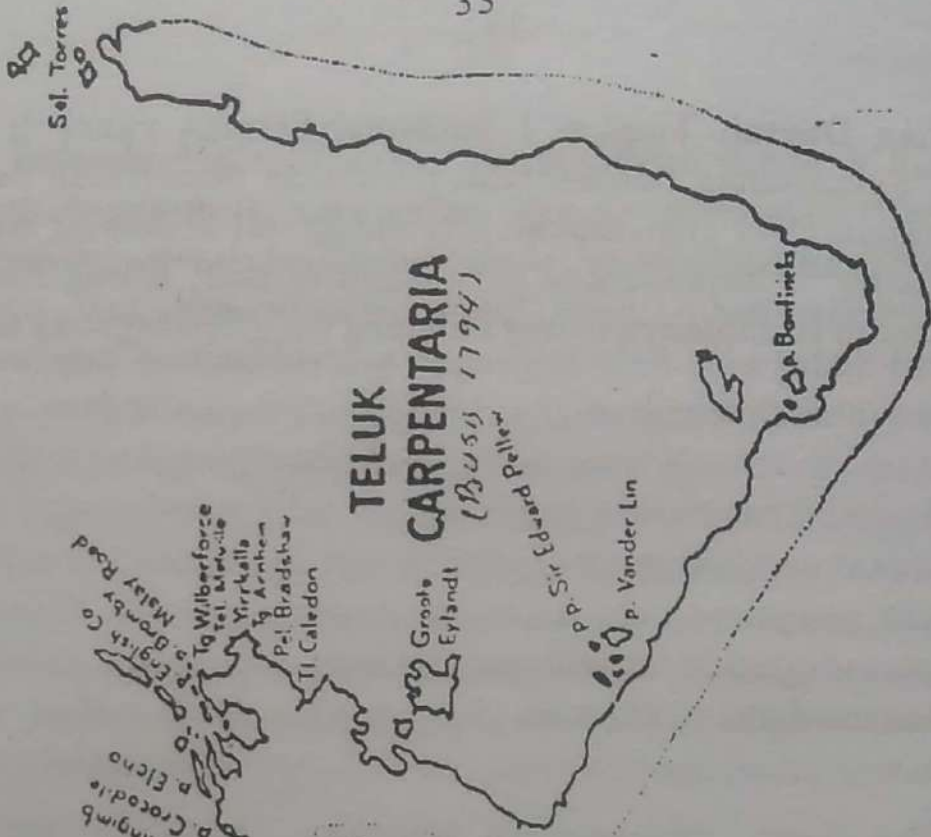
TELUK
 CARPENTARIA
 (BUS 1794)

Groote
 Eylandt

p. Sir Edward Pellew
 p. Vander Lin

PANTAI UTARA AUSTRALIA

p. Bonifacio



D. Kota Pantai Makassar : Tata Ruang dan Fisik Bangunan

Kota pantai Makassar sejak awal yakni Somba Opu dan pergeserannya di sekitar Benteng Ujung Pandang, telah mengalami perubahan-perubahan tata ruang dan tata fisik bangunan pendukungnya. Perubahan ini sebagai konsekwensi dari perpindahan letak geografis dan perpindahan pemegang sublimasi kekuasaan. Kota pantai Makassar sejak awal, secara geografis terletak pada pesisir Selat Makassar bahagian selatan dengan dukungan sungai Jeneberang. Kondisi ini menempatkan kota pantai Makassar sebagai sebuah kota maritim.

Di muka telah dijelaskan, bahwa ada beberapa unsur pokok sebagai faktor pendukung lahirnya kota pantai Makassar. Selain faktor geografis, ekonomis, pertumbuhannya juga dipengaruhi oleh keberadaan Gowa sebagai sebuah kerajaan sebagai pendukung dari segi lain. Sehubungan dengan keberadaan kerajaan Gowa secara politis, kota pantai Makassar dari segi ruang adalah antara pusat kerajaan Gowa (Somba Opu) dan pusat kerajaan Tallo. Asumsi ini terlepas dari tata fisik bangunan, akan tetapi dilihat dari segi politis yakni kerajaan Gowa-Tallo sebagai kerajaan kembar. Karena itu, ibu kotanya boleh dikatakan satu apalagi dengan posisi dan letaknya pada pesisir yang sama. Dari segi tata fisik bangunan, dengan sorotan faktor politik, terlihat bahwa bangunan benteng-benteng pertahanan (khusus untuk pertahanan pusat kerajaan Gowa) dari arah selatan Benteng Sanro Bone sampai ke ujung utara benteng Tallo. Apabila dukungan tata fisik kota dengan bangunan benteng-benteng diterima sebagai suatu konsep peletak dasar pembentukan suatu kota, maka kota pantai Makassar sejak dibangunnya Benteng Somba Opu dan benteng-benteng pengawalnya sudah lahir.

Sangat menarik perhatian, bahwa tata kota pusat kerajaan Gowa (kota pantai Makassar), terdapat pemisahan-pemisahan kompleks bangunan pendukungnya. Pemisahan ini antara lain kompleks bangunan para penguasa (raja), para pedagang dan para penguasa-penguasa di tingkat bawah. Wertheim berpendapat bahwa tata kota di buat secara tradisional dan direncanakan oleh penguasa yang lebih tinggi. Beliau memberikan contoh tata kota kraton kuno di Jawa, yaitu

adanya alun-alun yang terletak di tengah-tengah kota, bangunan-bangunan terpenting didirikan secara tradisional dan jalan-jalan lurus berpotongan berbentuk bujur sangkar²⁰. Menurut penulis bahwa tata fisik bangunan kota pantai Makassar tahap awal juga demikian (lihat denah kota Somba Opu tahun 1638)²¹.

Tata fisik bangunan antara bangunan-bangunan terpenting tadi, terdapat pemisah antara satu dengan yang lainnya. Pemisahan antara bangunan istana dengan bangunan lainnya biasanya dibatasi oleh pagar atau tembok. Sehingga untuk memasuki istana hanya melalui pintu-pintu tertentu. Hal ini disamping sebagai pertahanan, juga dimaksudkan agar pengawasan terhadap raja (keluarga raja) lebih mudah. Untuk hal ini dapat dilihat pada buku catatan harian raja Gowa-Tallo.

Untuk melihat dengan jelas perubahan-perubahan tata fisik bangunan pendukung kota pantai Makassar, penulis akan menguraikan penataan tersebut khususnya pada pertumbuhan tahap awal yakni Somba Opu dan pertumbuhan tahap ke dua di kompleks Benteng Ujung Pandang²².

Kota pantai Makassar tahap awal, di dukung oleh istana sebagai bangunan induk, tempat peribadatan, pasar, perkampungan-perkampungan orang asing dan pribumi dan bangunan-bangunan bagi para pembesar kerajaan beserta bangunan untuk para prajurit

²⁰Sartono Kartodirdjo, et. al. 1975. Sejarah Nasional Indonesia. Jakarta : Depdikbud. jld. III. h. 156

²¹Djirong Basang et. al. 1985/1986. Pengkajian (Transliterasi dan Terjemahan) Lontarak Bilang Raja Gowa dan Tallo (Naskah Makassar). Ujung Pandang : Depdikbud Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sulsel La Galigo, h. 95

²²Somba Opu dan Ujung Pandang dianggap sebagai bahagian dari kota pantai Makassar. Artinya di dalam kota pantai Makassar terdapat kedua tempat tersebut dengan masing-masing fungsinya. Somba Opu sebagai pusat kerajaan (inti kota) dan Ujung Pandang sebagai tempat pembangunan benteng pengawal.

kerajaan. Dalam catatan harian kerajaan Gowa-Tallo disebutkan, bahwa pada tahun 1631 terjadi kebakaran hebat dengan musnahnya 556 buah rumah. Berarti dukungan fisik bangunan kota pantai Makassar saat ini tidak kurang dari jumlah tersebut²³.

Bangunan fisik istana raja Gowa Somba Opu, terlihat adanya bahagian halaman yang kosong sebelum memasuki ruangan raja. Bangunan istana ini di mukanya terdapat jalan-jalan dan bangunan tempat pengawal kerajaan (lihat denah kota Somba Opu).

Bangunan tempat peribadatan di Somba Opu, bukan saja bangunan peribadatan bagi orang Islam, akan tetapi juga terdapat bangunan tempat ibadah untuk orang-orang kristen. Mattulada mengatakan, bahwa sejak Somba Opu diratakan dengan tanah oleh Hindia Belanda bangunan-bangunan seperti tempat peribadatan, berupa mesjid dan gereja, loji-loji para pedagang asing ikut hancur²⁴.

Pembangunan mesjid di Somba Opu, dikenal terdapat di Mangallekana. Mesjid ini dibangun sebelum raja Gowa memeluk agama Islam. Dengan demikian berdasarkan analisa peng-Islaman di Gowa, maka mesjid Mangallekana yang belum diketahui namanya tersebut merupakan mesjid tertua di Sulawesi Selatan²⁵.

Di dalam kota Somba Opu, juga terdapat pasar sebagai sarana jual beli. Masyarakat Somba Opu yang kehidupannya didukung oleh pelayaran dan perdagangan, maka pasar adalah merupakan sarana yang sangat penting. Kenyataan seperti ini dapat dilihat pada peninggalan peninggalan purbakala di Kompleks Benteng Somba Opu. Peninggalan-peninggalan tersebut, seperti adanya mata uang, keramik lokal dan asing, alat-alat rumah tangga dan lain-lain²⁶.

²³Djirong Basang et. al. Op. Cit, h. 97

²⁴Mattulada. 1982. Op. Cit. h. 53

²⁵Mesjid tertua di Sulawesi Selatan ada beberapa versi, antara lain Mesjid Djami Palopo, Mesjid Katangka dan Mesjid Mangallekana.

²⁶Ieng Eustachius et. al. Laporan Pengupasan Dinding Benteng Somba Opu. 1992, Ujung Pandang : Suaka PSP Sulselra, h. 35

Selain bangunan Istana, tempat peribadatan dan pasar di Somba Opu juga terdapat bangunan-bangunan perwakilan dagang orang asing seperti Arab, Cina, India, Denmark yang di istilahkan oleh Mattulada loji-loji dagang bangsa asing ini, ditentukan oleh penguasa atau raja. Misalnya perkampungan Cina, menurut Skinner terletak di sebelah utara kota Somba Opu. Menurut Valentijn perkampungan tersebut bukan saja diperuntukkan bagi orang-orang Makassar, akan tetapi juga diperuntukkan bagi orang asing²⁷.

Kota pantai Makassar tahap awal dikelilingi oleh tembok-tembok keraton. Tembok ini berfungsi sebagai pertahanan sehingga ditempat prajurit pengawal kerajaan, disamping benteng-benteng pertahanan (benteng pengawal) di luar kompleks Somba Opu sebagai inti/pusat kerajaan.

Dengan demikian terlihat bahwa kota pantai Makassar tahap awal, di dukung oleh bangunan induk berupa istana, tempat peribadatan, perkampungan orang-orang pribumi, perkampungan orang asing dan tempat para prajurit kerajaan.

Tata ruang dan tata fisik bangunan kota pantai Makassar di Kompleks Benteng Ujung Pandang, seperti telah disebutkan bahwa di dasarkan pada penandatanganan perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Selanjutnya pada tahun 1669, pergeseran itu semakin nampak, setelah Benteng Somba Opu sebagai inti kota pantai Makassar diratakan dengan tanah oleh Belanda. Menurut analisa Mattulada, pada tanggal 24 Juni 1669 seluruh benteng Somba Opu di duduki oleh belanda, setelah pertempuran sepuluh hari sepuluh malam tak henti-hentinya. Benteng Somba Opu diledakkan dan diratakan dengan tanah. Sejak itu perpindahan keramaian dan perkembangan kota Makassar ke bahagian utara, sekitar benteng Ujung Pandang, kota Vlaardingen yang diduduki oleh Belanda dan Bontoala diduduki oleh Aru Palakka²⁸.

²⁷Sartono Kartodirdjo, et. al. Op. Cit. h. 16

²⁸Mattulada, 1982. Op. Cit. h. 152

Berdasarkan analisa di atas, maka tata ruang awal kota pantai Makassar tahap ke dua, terdiri dari benteng Ujung Pandang, Vlaardingen dan Bontoala. Tata ruang seperti ini dengan sendirinya akan diikuti oleh tata cara fisik bangunan. Kondisi ini memungkinkan perkembangan kota.

Apabila pendudukan Belanda di Kompleks benteng Ujung Pandang dihubungkan dengan kondisi politik di Makassar pada saat itu, dimana penguasaan Belanda belum secara mutlak²⁹. Ini berarti bahwa penataran fisik kota, belum mendapat perhatian kecuali untuk menopang pertahanan dan keamanan. Bagi Belanda dan sekutunya. Untuk hal itu adalah suatu hal yang wajar pada masa itu di sekitar Karebosi sekarang dibangun benteng untuk Aru Palakka. Benteng tersebut disamping sebagai pertahanan bagi Aru Palakka, juga merupakan kediaman. Sementara itu untuk para penguasa Belanda, dengan kondisi politik yang tidak stabil belum memungkinkan untuk membangun dalam skop yang besar. Bertolak pada asumsi di atas, maka penulis melihat yang dimaksudkan Vlaardingen pada awalnya adalah Benteng Ujung Pandang sendiri, walaupun kemudian berkembang menjadi perkampungan orang-orang Belanda di sekitarnya. Berarti tata fisik awal kota pantai Makassar di Kompleks Benteng Ujung Pandang adalah Benteng Ujung Pandang sebagai pusat pemerintahan dan pemukiman orang-orang Belanda dan Karebosi serta Bontoala sebagai perkampungan orang-orang Bugis termasuk Bone.

Perubahan tataruang dan tata fisik bangunan kota pantai Makassar tahap ke dua selanjutnya, yakni sejak penandatanganan pembaharuan atas perjanjian Bongaya pada bulan Juni 1824. Perjanjian tersebut di tanda tangani oleh Vander Kapellen di pihak Belanda dan raja-raja di Sulawesi Selatan. Perjanjian tersebut dinamakan "perjanjian pembaharuan atas perjanjian Bongaya 1667/1669 atau Bongaisch Contract te Oejoeng Pandang Verniew"³⁰. Sublimasi kekuasaan

²⁹Sejak penandatanganan perj. Bongaya pergerakan raja-raja di Sulawesi Selatan masih tetap berjalan.

³⁰Mattulada, 1982. Op. Cit. h. 20

Belanda sejak 1824, bahkan dianggap oleh Daud Limbugau, sebagai dasar dimana Hindia Belanda memulai pemerintahannya di Sulawesi Selatan secara mutlak³¹.

Pergeseran kota pantai Makassar tahap ke dua ke Kompleks Benteng Ujung Pandang³², di bawah penguasaan Hindia Belanda, berdasarkan Stadblad 1824 No.31 a dengan status Distrik.

Disamping itu, sejak tahun 1824 Distrik Makassar sebagai ibukota pemerintahan untuk daerah Sulawesi dan daerah-daerah takluknya. Status Makassar seperti ini dengan sendirinya akan membentuk pola-pola perkampungan sesuai dengan fungsinya. Pembentukan pola perkampungan ini baik ditentukan oleh penguasa maupun ditentukan oleh penduduk kota itu sendiri berdasarkan kepentingannya.

Penataan kota pantai Makassar tahap ke dua, menurut Daud Limbugau, bahwa Distrik Makassar pada tahun 1824, telah dilengkapi dengan beberapa kampung di dalamnya yakni : Vlaardingen, prinshendrik Pad dan Kampung Baru³³. Perubahan tata ruang dan tata fisik Makassar selanjutnya dengan sendirinya akan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan politik dan jumlah penduduk pendukung kota. Gambaran ini dapat dilihat pada penulisan Daud Limbugau sebagai berikut ; perkampungan kota pantai Makassar pada tahun 1890 terdiri dari Vlaardingen, Prinds Hendrik Pad, Kampung Baru,

³¹Daud Limbugau. Op. Cit. h. 21

³²Persepsi tentang kelanjutan kota pantai Makassar dari Somba Opu yang dianggap penulis sebagai tahap pertama dan kompleks benteng Ujung Pandang sebagai tahap kedua, didasarkan pada faktor pendukung lahirnya kota dari segi politik. Maksudnya keberadaan Somba Opu dan Ujung Pandang dilatarbelakangi oleh lahirnya kerajaan Gowa. Kerajaan Gowa yang akhirnya dikalahkan oleh Hindia Belanda, sehingga Hindia Belanda mempunyai kesempatan untuk tinggal dan membentuk perkotaan (kota pantai Makassar).

³³Mukhlis paeni ed. Op.cit. h. 22

Kampung Jawa, Ranggong, Pattunuang, dan Konings Plain³⁴.

Sejak tahun 1906 pada saat Makassar menjadi Gemente, Makassar sendiri terdiri atas Distrik Makassar, Wajo, Ujung Tanah, Mariso dan Adatgemenchap Galesong. Sebelum tahun 1921 Makassar terdiri atas 6 distrik yakni; Makassar, Wajo, Melayu, Ende, Ujung Tanah, dan Mariso. Sesudah tahun 1921 hanya terdiri dari 4 distrik yakni; Makassar, Wajo, Ujung Tanah dan Konings Plain³⁵. Perubahan-perubahan status administrasi Pemerintahan seperti di atas, akan diikuti oleh perubahan-perubahan tata fisik bangunan termasuk bagi para pejabat dan pelaksana pemerintahan.

Sebagai gambaran tata fisik kota pantai Makassar tahap ke dua sejak pergeseran inti kota pantai Makassar di sekitar Benteng Ujung Pandang, berikut bangunan-bangunan sarana dan prasarana kehidupan masyarakat sejak Hindia Belanda sampai pendudukan Jepang.

Bidang pendidikan. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dinas pengajaran dan Kerajinan (Directuur Van Onderwijs Eredients en nijverheid) tanggal 13 Juli 1869 No. 5636³⁶, di Makassar didirikan sebuah sekolah rendah kelas dua dan sekolah rendah kelas satu. Tahun 1876, B.F. Mathes membuka Kweek School dengan tujuan mencetak tenaga guru³⁷. Tahun 1904 untuk pertama kalinya didirikan sebuah sekolah untuk umum di Ujung Tanah dan di bagian selatan Kanrobosi/Karebosi sekarang di bangun *Inslandsche School*³⁸. Sementara itu tahun 1906 dan tahun 1907 di Makassar di bangun Holland

³⁴Lihat Daud Limbugau, dalam Mukhlis ed. dengan mengutip ANRI Administratif Verlag Gouvernement Celebes en onderhorigeden th. 1869.

³⁵Ibrid, h. 23

³⁶Ibrid, h. 15

³⁷Mukhlis paeni, et. al. Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Selatan Mobilitas Sosial Kota Makassar 1900-1950. Jakarta : Depdikbud, 1984/1985 h. 103

³⁸Ibrid, h. 108-109

Ambosche School (HAS) dan sekolah khusus untuk orang-orang Cina dengan nama Holland Chinese School (HCS) dengan jangka waktu masing-masing 7 dan 5 tahun³⁹. Tahun 1920 di bangun sekolah MULO (Middle boore Uitgebruik Lagere Onderwijs) dan OSVIA (Opleiding School Var Indlansche Ambstenaaren), sebagai lanjutan dari HIS atau HCS dan HAS. Disamping itu juga dibangun sekolah keterampilan pada tahun 1927 yaitu Ambth School yang menghasilkan tukang kayu dan solder. Di antara sekolah-sekolah tersebut pendidikan guru merupakan prioritas utama, yang ditandai dengan didirikannya sekolah LVO (Legaang Voor Onderwijs) dan CVO (Cursus Voor Onderwijs)⁴⁰.

Bidang kesehatan, menurut Daud Limbugau, sebelum pendudukan Jepang di Makassar terdapat beberapa bangunan (sarana dan prasarana kesehatan), antara lain :

- Rumah sakit tentara (Hospitalen militairi) yang sekarang ini dikenal dengan nama rumah sakit Pelamonia, pertama dibangun tahun 1869.
- Rumah Sakit Dadi, yang sekarang dikenal dengan nama "Rumah Sakit Umum Dadi" Ujung Pandang.
- Rumah Sakit Labuang Baji
- Rumah Sakit Santa Melania
- Rumah Sakit Stella Maris
- Poliklinik Pattunuang, Poliklinik Labuang Baji, Palang Merah Cina dan Poliklinik Stella Maris⁴¹.

Bidang agama, dalam lontarak bilang raja Gowa-Tallo disebutkan

³⁹Ibrid, h. 109

⁴⁰Daud Limbugau. Op.cit h. 37

⁴¹Ibrid, h. 38

bahwa sejak 10 November 1634⁴², di Bontoala telah dibangun sebuah mesjid. mesjid tersebut disamping sebagai tempat pelaksanaan ibadah juga digunakan sebagai sarana pengembangan Islam. Demikian juga agama Kristen, yang ditandai dengan pembentukan sebuah organisasi, walaupun pengembangannya sendiri di daerah-daerah sekitar Makassar⁴³. Perkembangan agama Islam sendiri mengalami perubahan-perubahan yang cukup besar sejak tahun 1900, utamanya sejak masuknya organisasi-organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah pada tahun 1926. Cabang Muhammadiyah Makassar saat itu dilengkapi dengan pengurus: Ketua H. Yusuf Daeng Mattoro, H. Abdullah, H. Aqmad Coleng, Muh. Yahya, Mansur A.L., Yamani, Daeng Minggu, H. Ahmad dan Abdul Karim sebagai pembantu. Tahun 1932 Muhammadiyah Cabang Makassar sendiri sebuah sekolah yakni Tabligh School yang dipimpin langsung oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA)⁴⁴.

Sementara itu pihak Kristen Katolik, telah membuka sekolah khusus bangsa Eropa dalam lembaga pendidikan ELS (Europasche Lagere School) di pinggiran Karebosi⁴⁵.

Dalam bidang komunikasi, menurut analisa Daud Limbugau, pasilitas seperti poros jalan, angkutan dan pegawai yang melayani pengantara surat-surat sudah tersedia. Selanjutnya beliau menyatakan, pada tahun 1866 sarana perhubungan di Makassar ada dua jenis yakni jalan darat dengan kuda dan laut dengan perahu. Walaupun beliau tidak menyebutkan bangunan perkantoran khusus untuk komunikasi.

Selain dukungan fisik bangunan pada aspek-aspek di atas, sejak penguasaan dan pergeseran kota pantai Makassar ke Benteng Ujung Pandang oleh Hindia Belanda juga secara fisik didukung oleh bangunan-bangunan perindustrian dan perdagangan. Di bidang

⁴²Djirong Basang. Op.cit hal.96

⁴³Daud Limbugau, Op.cit. h. 40

⁴⁴Ibrid, h. 40

⁴⁵Ibrid, h. 41

perdagangan misalnya munculnya perkumpulan-perkumpulan perdagangan dengan kolonial di Makassar, yang dikelola sendiri oleh orang-orang Bugis Makassar⁴⁶.

Pada masa pendudukan Jepang dan masa transisi di Makassar, yakni tahun 1942 sampai tahun 1960-an, sarana-sarana pendukung tata ruang dan tata fisik bangunan sebahagian hanya dilanjutkan. Namun bukan berarti bahwa perubahan itu tidak ada, akan tetapi pada kurun waktu ini, masyarakat sangat dipengaruhi oleh komplik-komplik politik.

Dukungan dari segi lain perkembangan kota pantai Makassar tahap ke dua, dengan bertolak pada konsep Max Weber tentang kota yang pada dasarnya adalah pasar, sejak pergeseran itu semakin berkembang. Untuk hal itu menurut Sarotno Kartodirdjo et. al bahwa pada akhir abad ke 19 di Sulawesi Selatan terdapat beberapa buah pasar antara lain : Jongaya, Sambung Jawa, Malingkeri, Sulingka, Sengkalo, Borong, Lamuru, Biring Bonto, Padang Taring, Panyangkalang, Kacico, Barombong, Mandala, Soreang, Karuwisi, Rappocini⁴⁷. Pada pasar-pasar ini dipungut cukai oleh "Jannang Pasara" sebesar 5 sampai 10%, menurut pendapat A.J.A.F. Eerdmans⁴⁸.

⁴⁶Daud Limbugau. Ibid. h. 53-61

⁴⁷Sartono Kartodirdjo. et.al. Op.cit h. 220

⁴⁸Ibrid, h. 220

E. Identifikasi Penamaan Makassar dan Ujung Pandang

Sumber penyebutan Makassar sejak kehadirannya, pada dasarnya bersumber baik dari penyebutan orang-orang asing, maupun penyebutan orang pribumi sendiri. Penyebutan itu didasarkan pada identitas-identitas yang melekat pada daerah tersebut. Kalau penyebutan ini, bersumber dari abgnsa-bangsa asing khususnya pada masa kejayaan kerajaan Gowa dan Tallo, maka penyebutan Makassar tersebut, ditujukan kepada kedua kerajaan tersebut yakni kerajaan Gowa dan Tallo. Demikian juga halnya apabila penyebutan itu di arahkan pada orang-orang yang mendiami jazirah selatan Sulawesi oleh orang-orang asing termasuk orang pribumi lainnya (bukan orang Makassar), juga disebutkan sebagai orang-orang Makassar (Mangkasara'). Seorang yang menunjuk kota kerajaan atau orang yang tinggal di jazirah selatan pulau Sulawesi dari pedalaman Sulawesi sendiri, akan menyebutkan dengan kata "di Makassar".

Berdasarkan indikasi-indikasi penyebutan nama Makassar tersebut di atas, maka kelihatannya bahwa penyebutan Makassar tersebut di arahkan pada daerah dan wilayah yang cukup luas. Dengan demikian Makassar sendiri pada masa ini, agak sulit menempatkan di mana sebenarnya kota Makassar itu sendiri.

Perkembangan penyebutan Makassar selanjutnya, yakni penyebutan Makassar pada suatu tempat yang boleh dikatakan sebagai suatu kota, yakni penyebutan Makassar terhadap ibu negeri kerajaan Gowa di Somba Opu sejak raja Gowa ke IX - XV. Ini berarti sejak saat itu, penyebutan Makassar telah ditujukan kepada suatu tempat atau kota kerajaan.

Demikian selanjutnya, penyebutan Makassar berlanjut sampai kepada penyebutan Makassar ibu negeri atau pusat pemerintahan Hindia Belanda, sejak penandatanganan pembaharuan atas perjanjian Bongaya (perjanjian Bongaya di Ujung Pandang), sampai pada penyebutan ibu negeri Makassar untuk pertama kalinya menjadi Kota Madya Makassar sejak tahun 1906. Pada pada pendudukan Jepang nama makassar tetap berjalan dengan sebutan Makassar Ken Kanrikang. Selanjutnya pada masa NIT (Negara Indonesia Timur), Makassar menjadi ibu negeri NIT dengan sebutan Kota Praja

Makassar. Sebutan Makassar, juga ditujukan kepada ibu negeri (ibu kota) Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan berdasarkan pada Undang-Undang No. 13 tahun 1964 (LN. 1964 No.94).

Sebutan Makassar terakhir secara formal, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1971, dengan menggantinya dengan nama Ujung Pandang. Dengan demikian penyebutan Ujung Pandang telah mengalami perubahan, yakni perubahan nama Ujung Pandang untuk benteng pengawal kerajaan Gowa pada bagian sebelah utara dan Ujung Pandang untuk penyebutan Kota Madya Ujung Pandang yang ada sekarang sejak tahun 1971.

IV

**BENTURAN-BENTURAN BUDAYA
DI MAKASSAR**

Kalau unsur kebudayaan itu menyangkut segala aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, agama dan politik, maka benturan-benturan budaya itu sendiri akan berkisar pada aspek-aspek tersebut. Benturan-benturan budaya ini secara nyata dapat dilihat dalam wujud kebudayaan. Wujud Kebudayaan tersebut baik wujud kebudayaan sebagai ide, norma, maupun wujud kebudayaan sebagai perlakuan dan wujud kebudayaan sebagai benda-benda. Sehubungan dengan itu, penulis akan mengemukakan benturan-benturan budaya di kota pantai Makassar pada unsur-unsur kebudayaan tersebut di atas.

1. Aspek Sosial

Aspek sosial pada dasarnya meliputi segala segi kehidupan kecuali politik. Namun demikian penulis hanya akan melihat segi teknologi, bahasa dan ilmu pengetahuan. Sejak kehadiran bangsa-bangsa asing di Makassar seperti masuknya Portugis pada tahun 1538¹, secara perlahan-lahan sudah mulai terjadi hubungan (hubungan budaya). Hubungan ini memungkinkan terjadinya akulturasi budaya secara evolusi.

Segi teknologi, secara nyata dapat dilihat pada arsitektur bangunan-bangunan benteng (lihat Benteng Ujung Pandang). Bahkan secara fisik arsitektur benteng-benteng pada abad ke XVI dan ke XVII di Makassar sangat dipengaruhi oleh teknologi Barat. Walaupun demikian bukan berarti, bahwa budaya barat seperti Portugis tersebut menghilangkan pola-pola budaya arsitektur bangunan di Makassar. Hal ini terlihat pada arsitektur bangunan-bangunan

¹ Mattulada. Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah (1510-1700). Ujung Pandang : Bhakti Baru Berita Utama, h. 14

rumah masyarakat (rumah adat) yang tetap berpola Bugi Makassar.

Demikian juga halnya dalam pembuatan mata uang, yang di kerajaan Makassar sudah dikenal sejak abad ke XVII dengan sebutan Dinara atau Benggolo², Mata uang ini bertuliskan Arab. Bersamaan dengan ini, di Makassar mulai terjadi pengenalan penggunaan logam, termasuk pengenalan senjata utamanya berasal dari Portugis, Inggris dan Belanda.

Sehubungan dengan aspek teknologi ini, dalam kaitannya dengan teknologi pembuatan perahu. Phinisi misalnya, dimana pendapat sementara menganggap lahir pada abad ke XVII. Kalau pendapat ini benar, maka kita bisa berasumsi, bahwa phinisi itu bukan hasil budaya murni kita (Bugis Makassar) akan tetap merupakan perpaduan antara budaya barat dan budaya asli Bugis Makassar.

Hal ini didasarkan pada pertanyaan, apakah pelayaran yang dilakukan oleh orang-orang Bugis Makassar tidak didahului oleh pelayaran orang-orang asing ke Makassar? seperti masuknya Hindu Budha di Jawa.

Dalam segi bahasa, juga terjadi pembauran. Pembauran budaya ini mengakibatkan munculnya kata-kata serapan yang dipergunakan oleh masyarakat Makassar. Misalnya kata kadera yang pada dasarnya berasal dari bahasa Portugis.

Demikian juga halnya sejak masuknya Belanda (VOC), pembauran budaya (Bahasa) inipun tetap berjalan. Contoh kongkrit, yakni adanya orang-orang Makassar yang mengetahui atau bisa berbahasa Belanda dan bahkan sebaliknya. Kondisi seperti ini utamanya didukung oleh pengenalan bahasa lewat sarana pendidikan, yang bahkan ada yang mempergunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Misalnya dapat dilihat pada operasional sekolah HAS (Holland Ambonsche School).

Pada aspek ilmu pengetahuan, disini penulis melihat pemakaian huruf dan menyangkut sarana dan prasarana pendidikan. Seperti

²Sartono Kartodirdjo, et.al. 1975. Sejarah Nasional Indonesia. Jakarta : Depdikbud. Jld. III h. 224

diketahui, di Makassar sejak abad ke XVI sudah dikenal aksara Lontarak. Masuknya Islam, juga membawa pengaruh yang cukup besar terhadap aspek pendidikan ini. Hal mana sejak munculnya Islam abad ke XVII, banyak penulisan-penulisan bahasa Makassar yang menggunakan huruf Arab, yang dikenal dengan nama huruf serang. Disini terlihat adanya difusi budaya, walaupun tidak menghilangkan budaya yang ada (lontarak).

Keadaan ini berlangsung hingga awal abad ke XX.

Pada permulaan abad ke XX, pemerintah yang berkuasa (Belanda) memberikan pendidikan dan pengajaran bagi bangsa terjajah. Dalam bidang pendidikan ini, baik pendidikan dalam bidang keagamaan seperti Islam dan Kristen, juga pendidikan yang di sekolah oleh pemerintah Belanda sendiri. Dalam tahun 1903, dengan diadakannya peraturan mengenai pendidikan sekolah desa (Volk School) yang lamanya 3 tahun pendidikan, bahkan sebelumnya telah didirikan sekolah-sekolah agama (sudah dijelaskan). Khusus untuk keluarga dan keturunan bangsawan, pejabat tinggi, atau bagi mereka yang dekat didirikan sekolah rendah dengan nama "Europesche Lagerschool" atau ELS³. Demikian juga pengenalan tentang Pers utamanya dari bangsa-bangsa Tionghoa (Cina), Melayu dan lain-lain.

2. Aspek Politik

Munculnya Jumpandang (Makassar) sebagai kota adalah karena dukungan komunitas penduduk, sebagai konsekwensi dari kondisi politik (sebagai pusat pemerintahan) dan sebagai pusat perdagangan. Sehingga para pegawai dan pendatang baik pedagang atau Pemerintah dengan sendirinya akan bermukim dan membentuk pemukiman ditempat-tempat yang didukung oleh sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tersebut, baik sarana perhubungan (laut), maupun sarana dan Prasarana atau tempat munculnya kebijakan - kebijakan Pemerintahan. Dengan dasar ini pula,

³Sarita pawiloy, et.al. Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan. Ujung Pandang : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. h. 47

memungkinkan munculnya atau dibangunnya sarana-sarana pendukung seperti sarana perhubungan darat seperti pasar strat. Demikian pula sarana-sarana pendukung terlaksananya roda pemerintahan dan perdagangan. Disini muncul bangunan-bangunan seperti kantor-kantor pemerintah sebagai pusat pelaksanaan pemerintahan.

Berkaitan dengan pelaksanaan roda pemerintahan (kelancaran nya), termasuk yang berkaitan dengan perdagangan, maka adalah suatu kebutuhan yang sangat mendasar untuk membangun sarana dan prasarana keuangan. Sehingga untuk maksud itu, di Makassar di bangun bank (beserta perangkat pelaksanaanya) seperti Spark Bank, sekarang Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Sejak masa pemerintahan Speelman, dengan menempatkan Benteng Ujung Pandang sebagai pusat pemerintahannya bahkan beliau menempatkan para pemuka agama dan kantor perdagangannya di dalam benteng. Dalam masa pemerintahan Speelman ini pula, perkembangan kota Makassar berkembang ke arah Somba Opu dengan menempatkan pemukiman pedagang-pedagang lokal dan asing, yang mengelompok berdasarkan suku atau bangsanya⁴.

Pusat pemerintahan dan kota Makassar sendiri bergeser ke Benteng Ujung Pandang, sistem pemerintahan di Makassar ada dua macam. Terjadinya dualisme pemerintahan ini karena disisi lain Belanda (VOC) sebagai penguasa membentuk pemerintahannya sendiri. Disisi lain pribumi dengan kerajaannya masih tetap beridri, yakni kerajaan Gowa yang kembali berpusat di Kale Gowa. Hal ini berlangsung hingga berakhirnya penjajahan di bumi Sulawesi Selatan (Makassar) (lihat struktur pemerintahan pemerintah Hindia Belanda dan Pribumi, terlampir).

3. Aspek Ekonomi

Pembauran budaya dari aspek ekonomi, penulis melihat dari

⁴Pola Perkembangan Kota dan Arsitektur Ujung Pandang. Proyek Penelitian dan Survey Terapan 1991 - 1992. Bappeda Kodya Tingkat II U. Pandang. h. 17

segi perdagangan. Walaupun aspek-aspek ekonomi itu sendiri menyangkut mata pencaharian dan pola-pola pemenuhan kebutuhan lainnya.

Kedatangan bangsa-bangsa asing di Makassar dengan sistem ekonomi komersial dan rasional, bertemu dengan sistem ekonomi pribumi (Makassar), yang bersahaja dan tradisional. Menurut G.H. Van Der Kohlf, bahwa hal ini muncul karena latarbelakang kebutuhan. Disatu sisi kebutuhan orang pribumi yang dianggap tetap, sedangkan disisi lain kebutuhan orang barat tidak terbatas⁵. Walaupun demikian menurut Kohlf, bahwa proses ekonomi pribumi dan barat pada dasarnya sama, yakni dari tradisional ke modern, yang pada suatu saat di Indonesia akan terjadi⁵.

Pertemuan dua sistem ekonomi, antara sistem ekonomi tradisional dan sistem ekonomi rasional dan komersil menurut Dr. J. H. Boeke, bahwa kedua bentuk perekonomian tersebut bagaikan minyak dan air yang tidak dapat bercampur⁶. Hal mana bahwa ekonomi tradisional yang kegiatan-kegiatan ekonominya didorong oleh kebiasaan-kebiasaan masyarakat, kehidupan, keagamaan dan lain-lainnya tetap berjalan. Demikian pula halnya dengan ekonomi asing dengan sistem ekonomi rasionalnya tetap juga berjalan.

Berkaitan dengan sistem ekonomi ini, yakni menyangkut perdagangan, bahwa munculnya orang-orang asing di Makassar memungkinkan bertemunya sistem dan pola-pola perdagangan yang berbeda-beda. Pertemuan beberapa sistem dan pola seperti jual beli yang hampir pasti berlainan seperti sistem dan pola jual beli Belanda, Portugis dengan sistem perdagangan tradisional. Misalnya datangnya bangsa asing dengan sistim dan alat-alat jual belinya, bertemu

⁵G.H. Van Der Kolhf. *Ekonomi Asli dan Asing Sama dan Berlainan*. Jakarta : Bhratara, 1974. h. 31

⁵Ibid, h. 18

⁶J.H. Boeke. *Ekonomi Dualistis : Dialog Antara Boeke dan Burger*. Jakarta : Bhratara. 1974, h. 5

dengan orang-orang pribumi dengan alat dan sistim jual belinya sendiri. Bangsa asing dengan alat jual belinya seperti emas dan perak dengan penentuan sistim nilai bertemu dengan orang-orang pribumi dengan sistem barter (tradisional). Pada gilirannya salah satu diantaranya harus mengikuti atau mengambil jalan tengah (perjanjian baru/pola baru). Contoh seperti ini dapat dilihat pada analisa Van Leur tentang sistem perdagangan di Asia Tenggara, yang mana menurut beliau, masih mengikuti pola-pola perdagangan tradisional⁷.

Berikut barang-barang yang diperdagangkan oleh bangsa-bangsa asing di Indonesia (termasuk Makassar) sejak abad ke 15 sampai abad ke 19.

Barang-barang yang berasal dari Cina abad ke 15 - 17 antara lain; Kesturi, Rhubarb (sejenis sayuran), kapur barus, mutiara, emas, perak, sutra, sutra tenunan, kain satin, brokade, sendawa, belerang, tembaga, besi, dan alat-alat seperti cerat, lemari yang diukir, perhiasan rambut, gelang tembaga, barang-barang porselin, seperti piring-piring, basi, mangkuk dan garam.

Barang-barang dari India, antara lain; bahan-bahan kaca, gading dan permata.

Barang-barang dari Gujarat, seperti tekstil, batu-batu permata, tarum, opium, sabun, barang-barang dari tanah liat, gandum, mentega dan dendeng dan lain-lain.

Barang-barang yang berasal dari Bengsala seperti; beras, gandum, mentega, gula, lak, sutra, saputangan, kain kasah halus bahkan termasuk budak-budak.

Malabar dan Koromandel, membawa barang-barang dagangannya berupa mentega, guci-guci, selaphare (kain putih), pakaian tenunan, benang, emas, perak karpet, bantal, baja.

⁷J.C. Van Leur. Abad ke 18 Sebagai Kategori Dalam Penulisan Sejarah Indonesia. Jakarta : Bhratara. 1971. h. 5-6

Barang-barang yang berasal dari Srilangka, antara lain berupa Timah. Pegu membawa barang-barang berupa beras, guci-guci, genta dan logam. Sedangkan yang berasal dari Siam membawa beras, timah, tembaga dan peti-peti berukir.

4. Aspek Agama

Benturan-benturan keyakinan keagamaan demikian pula halnya. Dalam bidang keagamaan, dengan hadirnya bangsa-bangsa asing di Makassar dengan agama dan keyakinannya bertemu dengan agama dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat Makassar. Pertemuan kedua bentuk keyakinan yang berbeda ini, dengan sendirinya akan menimbulkan komplik-komplik keagamaan dan keyakinan. Komplik atau benturan-benturan ini, bahkan bukan saja pada aspek keyakinan keagamaan, akan tetapi juga menyangkut perlakuan keagamaan. Perbedaan perlakuan dan tindakan-tindakan keagamaan tersebut dengan sendirinya akan mengarah pada hasil-hasil budaya keyakinan itupun akan berbeda. Pembauran keyakinan keagamaan seperti ini, akan membawa perubahan-perubahan keyakinan, perlakuan dan hasil-hasil budaya agama tersebut.

Abad ke XVII, misalnya bahwa kehadiran bangsa asing yang beragama Islam atau Kristen bertemu dengan masyarakat dengan keyakinan yang sudah ada. Bahkan dalam masyarakat Makassar saat itu sudah terdapat beberapa keyakinannya, yakni adanya penganut Hindu Budha, termasuk keyakinan asli Indonesia⁸. Dengan demikian kehadiran bangsa asing dengan keyakinan tidak dengan begitu saja diterima oleh masyarakat Makassar, termasuk agama Islam. Walaupun pada akhirnya Islam berkembang dengan baik di Makassar khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Penerimaan Islam ini, ditandai dengan masuknya Islam raja Tallo I Malingkaang Daeng Manyonri Sultan Abdullah Awalul Islam dan raja Gowa I Mangarangi Daeng Manrabia Sultan Alauddin⁹.

⁹Mengenai keyakinan asli Indonesia, dijelaskan oleh Koen-tjaraningrat yakni berupa kepercayaan kepada yang ghaib, dan kepercayaan kepada Dewata Sewwae

Walaupun demikian, keyakinan Islam tersebut belum mampu untuk merubah total keyakinan, perlakuan dan hasil-hasil budayanya. Hal ini dapat dilihat utamanya menyangkut hasil-hasil budaya keagamaan, seperti relief-relief yang ada pada bangunan mesjid. Demikian juga dalam hal perlakuan keagamaan, seperti sistim penguburan kehadiran Islam membawa perubahan (arah timur barat menjadi arah utara selatan).

Sebagai hasil fisik dari pembauran tersebut, misalnya pengenalan tentang Klenteng-Klenteng, Kuil, Gereja serta sarana dan prasarana peribadatan. Demikian juga pengenalan tentang kuburan atau nisan yang bertuliskan Al Qur'an dan relief-relief sebagai pengaruh dari kebudayaan-kebudayaan bangsa asing.

SEJARAH POLITIK (POLITICAL HISTORY) DI MAKASSAR

Apabila Makassar sebagai sebutan ibu negeri Gowa dan Tallo¹, maka pembicaraan mengenai politik dan peristiwa yang terjadi di kota pantai Makassar tidak akan terlepas dari supermasi kedua kerajaan kembar tersebut. Sehubungan dengan hal di atas, penulis akan mengemukakan babakan pemerintahan dan penguasaan di Makassar sebagai berikut :

1. Masa Gowa Purba dan terbentuknya kerajaan Gowa
2. Masuknya Islam
3. Perang Makassar dan Penguasaan Belanda (VOC)
4. Masa transisi
5. Masa kekuasaan Hindia Belanda
6. Masa Pemerintahan Jepang
7. Masa Kemerdekaan

1. Masa Gowa purba dan terbentuknya kerajaan Gowa

Cikal bakal lahirnya kerajaan Gowa tidak diawali oleh adanya To Manurung². Akan tetapi sebelumnya sudah terdapat negeri-negeri kecil dengan penguasa dan pemimpin masing-masing. Negeri-negeri kecil ini menurut analisa para ilmuwan, negeri-negeri ini masing-masing mempunyai otonomi. Ini berarti negeri-negeri

¹ Mattulada. Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah. (1510-1700). Ujung Pandang : Bhakti Baru - Berita Utama. h. 21

² To Manurung, pada dasarnya adalah merupakan interpretasi masyarakat tradisional, yang mengkultuskan pemimpinnya. Ini ditentukan oleh tingkat pengetahuan bahkan dipengaruhi oleh kepercayaannya.

tersebut berhak menentukan arah dan tujuan negerinya. Namun demikian belum ada yang mengemukakan mengenai sistem dan bentuk pemerintahannya.

Proses selanjutnya dari keberadaan negeri-negeri kecil yang mendiami Gowa (baca : Gowa purba), ialah pertentangan diantara mereka, sehingga sering terjadi peperangan. Dalam keadaan seperti ini muncul persepakataan diantara mereka untuk bersatu atau bergabung. Pada saat itu negeri-negeri kecil (terdiri dari 9 buah negeri) itu membentuk suatu gabungan. Penggabungan dalam bentuk federasi tersebut dipimpin oleh seorang yang disebut "Paccalaya".

Paccalaya itu sendiri dipilih dari salah satu pemimpin negeri. Ini berarti bahwa Panccalaya disini merupakan pemimpin tertinggi diantara pemimpin-pemimpin negeri kecil lainnya. Sagimun, MD mengatakan, bahwa Paccalaya ini merupakan "ketua dewan" yang terdiri dari penguasa-penguasa negeri yang bergabung itu. Bila terjadi sengketa, Paccalaya bertindak sebagai hakim tertinggi. Termasuk sengketa atau pertentangan antara pemimpin-pemimpin negeri³. Periode awal Gowa dalam bentuk federasi/gabungan ini, dikenal dengan istilah "Gowa Purba".

Dalam keadaan seperti di atas, pernah daerah-daerah kecil tersebut tidak mempunyai pemimpin "Vacum pemerintahan", walaupun mereka sendiri tidak mau memilih pemimpin untuk mereka. Bersamaan dengan itu muncul seorang yang tidak diketahui asal usulnya. Karena tidak diketahui asal usulnya, sehingga disebut "Tumanurungnge", yang sekaligus diangkat sebagai raja Gowa pertama (I). Berarti bahwa mulai saat itu Gowa menjadi sebuah kerajaan. Diangkatnya Tumanurung sebagai raja, berarti kepemimpinan negeri-negeri kecil tadi dialihkan kepada raja. Pada saat itu penguasa dari negeri-negeri kecil, dirubah tugasnya menjadi "Kasuwiang Salapanga", artinya pengabdian yang sembilan orang⁴.

³Sagimun MD. 1985. Sultan Hasanuddin Menentang VOC. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. h. 11

⁴Ibid, hal. 12

Penobatan To Manurung menjadi raja/pemimpin di Gowa pada awalnya didahului oleh suatu ikatan janji antara raja-raja kecil dan pemimpinnya, dengan orang yang dianggap turun dari kayangan tersebut.

Isi perjanjian, yang sekaligus penobatannya sebagai raja Gowa adalah sebagai berikut :

Berkatalah Paccalaya dan raja-raja kecil itu kepada perempuan yang dianggap Tumanurung itu : "Kami semua datang kemari untuk mengambil engkau menjadi raja kami". Perempuan itu selanjutnya disebut "Tumanurung" menjawab : "Nukaraengamma" kumaddengka, kumangngalle je'ne (= engkau pertuan kami, masih menumbuk, masih mengambil air).

Berkatalah kesembilan raja-raja kecil kepada Tumanurung : "Bainemmanjanjo temaddengka, tamangalle je'ne alaikumammoseng kikaraengan (= sedangkan istri kami tidak menumbuk, tidak mengambil air apalagi engkau yang kami pertuan

Tumanurunga relalah diangkat menjadi raja. Demikianlah maka Tumanurunga diangkat menjadi raja Gowa⁵.

Penjelasan selanjutnya mengenai hadirnya Tumanurung sebagai bakal pemegang kekuasaan di kerajaan Gowa, adalah datangnya dua orang yang tidak diketahui ayah budanya. Keduanya masing-masing bernama "Karaeng Bayo" dan "Lakipadada". Keduanya masing-masing mempunyai kelewang yang disebut "Tanruballanga" dan "Sudanga". Setelah Kasuwiang Salapangan mengetahui kedatangan kedua orang ini, bersepakatliah untuk menemui "Karaeng Bayo" untuk memperistrikan "Tumanurunga". Pada pertemuan mereka dengan Karaeng Bayo, berkatalah mereka :

I kau mae kialle kipasi kalabbini Karaemmang (= kami datang mengambil engkau untuk mempersuami istrikan engkau dengan raja kami). Berkatalah Karaeng Bayo : Nupanaung jakinjo selantama

⁵ Abd. Razak Dg. Patunruk. 1983. Sejarah Gowa. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara. h. 2

Masa pemerintahan raja Gowa ke tiga ini, juga tidak diketahui dengan jelas. Raja Gowa ke 3 ini digantikan oleh putranya, yakni "Tuniabanri" (raja Gowa ke IV). Selanjutnya digantikan oleh raja Gowa ke lima bernama "Karampang ri Gowa". Raja Gowa ke lima ini digantikan oleh putranya sebagai raja Gowa ke enam bernama "Tunatangka' Lopi".

Berbeda dengan raja Gowa I-V, raja Gowa ke VI ini, telah dijelaskan hal ikhwalnya. Bentuk pemerintahan, istri dan anak-anaknya, telah dijelaskan dalam lontarak "Patturioloang".

Seperti telah disinggung di muka, bahwa kerajaan Gowa pada masa pemerintahan "Tunatangka Lopi", terjadi pembagian kerajaan Gowa menjadi dua, yakni kerajaan Gowa dan kerajaan Tallo. Pembagian wilayah dan penguasa kerajaan Gowa ini, menjadi dua setelah berakhirnya pemerintahan Tunatangka Lopi. Pemisahan ini, pada dasarnya dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat diantara dua putra Tunatangka Lopi. Dengan dasar inilah, sehingga wilayah dan penguasa di Gowa diberikan kepada "Batara Guru". Sementara Tallo diberikan kepada "Karaeng LoE ri Sero" sebagai raja/penguasanya.

Setelah Gowa berada di bawah kekuasaan Batara Guru, sebagai raja Gowa ke VII, beliau memperistrikan seorang putri dari raja Garassi. Dari perkawinan beliau lahir tiga orang anak, masing-masing I Pakere Tau Tunijallo ni Passuki dan Baratana (Krg. Garassi) dan seorang perempuan yang bernama Karaeng ri Bone. Setelah istri pertama wafat, beliau kawin dengan I Resasi, yang menghasilkan dua orang anak. Kedua adalah Daeng Matanre Tumapa'risi' Kalonna dan Karaenga Makabalu.

Setelah wafatnya Batara Gowa, beliau mewariskan tahta kerajaan tersebut kepada anaknya I Pakere Tau. I Pakere Tau atau Tunijallo ni Passuki sebagai raja Gowa ke delapan tidak mempunyai anak, maka tahta kerajaan selanjutnya diwariskan kepada Daeng Matanre Tumapa'risi' Kallonna sebagai raja Gowa ke IX.

Pada masa pemerintahan Tumapa'risi' Kallonna, beliau memperistrikan anak perempuan Karaeng Tunibalu ri Suriwa, raja Tallo yang ke II. Perkawinan beliau ini, lahir empat orang anak.

buttaya ikau pattanaya parasangang nakipammakangang, alaiyama-moseng kaumpanaiki ripuannu kalukua. nataki katiruang (= sedangkan engkau si empunya negeri menurunkan kami ke dalam lobang tanah, kami berdiam diri, apalagi kau naikkan kami ke puncak pohon kelapa, sudah tentu hal ini sangat menggembirakan bagi kami)⁶.

Setelah permintaan itu diterima dengan baik oleh Karaeng Bayo, maka dilangsungkanlah pernikahannya.

Dari perkawinan beliau (Tumanurunga) dengan Karaeng Bayo, lahir seorang putra, yang keadaannya dianggap luar biasa. Disebutkan dalam lontarak, bahwa dia lahir setelah tiga tahun amanya dikandung oleh bundanya. Setelah lahir langsung dapat berbicara dan berlari-lari, dan lain-lain keluarbiasaannya. Anak ini oleh ayah bundanya diberi nama "Tumassalangga Baraya (ng)".

Setelah anak tersebut mulai dewasa, ibundanya (Tumanurunga) membelah dua tokoh kerajaan yang ada padanya. Setelah itu ibundanya mairat/menghilang⁷, yang diikuti oleh "Karaeng Bayo" ayahnya dan Lakipadada. Dalam peristiwa mairat ini, Karaeng Bayo meninggalkan kelewangnya untuk Tumassalangga Barang (ng). Kelewang tersebut yakni Tanru Ballanga, Sudanga dan Tanrisamanga, yang kemudian menjadi "Kalompoang" (= kebesaran) kerajaan Gowa. Sejak saat itu Tumasalangga Baraya (ng), menjadi raja Gowa ke II menggantikan bundanya.

Masa pemerintahan serta bentuk pemerintahan beliau belum ada yang mengetahuinya, termasuk istrinya. Namun diceriterakan bahwa beliau mempunyai seorang putra yang bernama "I Puang LoE Lembang" (raja Gowa ke 3).

⁶Ibid. hal. 3 - 4

⁷Mairat/menghilang, terjadi pada raja-raja Gowa mulai dari raja I sampai pada raja Gowa ke enam. Pada raja Gowa ketujuh raja Gowa meninggal seperti manusia biasa.

Antara lain I Mariogau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga, I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibatta, I Tapicinna Karaeng Bone dan I Sapi Karaeng ri Somba Opu.

Sejak pemisahan kerajaan Gowa menjadi dua, yakni kerajaan Gowa-Tallo, pernah terjadi perang saudara. Perang saudara tersebut diakhiri dengan suatu perjanjian yang disebut "Rua Karaeng Se're Ata" (dua raja seorang hamba)⁸.

Setelah memerintah selama 36 tahun, raja Gowa ke IX wafat, tahta kerajaan diwariskan kepada I Mario Gau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga Ulaweng sebagai raja Gowa ke X. Selanjutnya raja Gowa ke XI adalah I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibatta. Raja Gowa XI inilah yang mengalahkan Bone, walaupun beliau sendiri gugur dalam perang.

Karaeng Tunibatta (raja Gowa XI) inilah yang merupakan orang pertama dimakamkan di Kompleks Makam Sultan Hasanuddin di Tamalate.

Karaeng Tunibatta setelah gugur melawan Bone, maka tahta kerajaan di Gowa beralih kepada putranya Karaeng Tunijallo sebagai raja Gowa ke XII. Pada masa pemerintahan Tunijallo, terjadi perjanjian antara Gowa dan Bone yang disebut "Ulukanaya ri Caleppa". Selain itu, pada masa pemerintahan raja Gowa ke XII, di Gowa untuk pertama kalinya datang orang-orang Islam. Bahkan beliau membangunkan sebuah mesjid untuk orang-orang Islam, sementara raja sendiri belum memeluk Islam.

2. Masuknya Islam

Dalam buku sejarah kebudayaan Islam dikatakan, bahwa diterimanya Islam di suatu daerah ditandai oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adanya orang Islam yang masuk di suatu daerah, adanya orang di daerah tersebut yang memeluk

⁸Harun Kadir, et.al. Sejarah Daerah Sulawesi Selatan. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

agama Islam dan berkembangnya Islam itu sendiri. Perkembangan Islam tersebut ditandai oleh dilaksanakannya konsep-konsep Islam dan tersedianya sarana dan prasarana ibadah di daerah tersebut⁹. Sehubungan dengan masuknya Islam di Kerajaan Gowa, maka akan dilihat pada proses seperti di atas.

Mengenai masuknya orang yang beragama Islam di kerajaan Gowa, yakni sejak pemerintahan raja Gowa ke X I Mariogau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga Ulaweng. Pada masa itu seorang orang Melayu yang bernama "Nakhoda Bonang" telah mendapat izin dari raja untuk berdiam di Gowa. Demikian pula pemberian hak-hak istimewa kepada beliau dan para pedagang yang datang dari Pahang, Patani, Johor, Campa dan Minangkabau¹⁰.

Pada masa pemerintahan raja Gowa ke XII, hubungan kerajaan Gowa dengan kerajaan-kerajaan diluarnya semakin baik. Ini terlihat dari persahabatannya dengan kerajaan-kerajaan Mataram, Maluku, Johor, Timor dan lain-lain¹¹. Selain hubungan/persahabatan dengan kerajaan-kerajaan tersebut, beliau juga mengadakan persahabatan dengan Sultan Ternate. Raja Ternate ini sempat datang di kerajaan Gowa, yang merupakan orang beragama Islam ke dua yang datang di Somba Opu, yaitu Sultan "Baab-Ullah".

Mengenai kehadiran orang Islam di Kerajaan Gowa seperti tersebut di atas (Nakhoda Bonang dan Sultan Baab-Ullah), diperjelas oleh Abd. Razak Dg. Patunruk. Beliau menjelaskan, bahwa pada masa pemerintahan raja Gowa ke XII Tunijallo, sudah banyak orang Melayu dari Pahang, Johor, Patani dan Sumatera tinggal berdagang di Kampung Mangallekana (Somba Opu). Disamping mereka berdagang, mereka pun tidak ketinggalan untuk menyebarkan Islam secara lunak di kalangan masyarakat Gowa. Sehubungan dengan

⁹Sejarah Kebudayaan Islam. Diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982. h. 93

¹⁰Abd. Razak Dg. Patunruk, Op.Cit.h.14

¹¹Ibid, h. 16

diterimanya orang-orang Melayu untuk tinggal, bahkan dibangun mesjid, penulis menduga bahwa sebelum diterimanya Islam oleh pihak kerajaan, sebelumnya ada orang-orang Gowa (masyarakat biasa) yang sudah memeluk Islam.

Proses Islamisasi selanjutnya di kerajaan Gowa, yakni adanya orang-orang Gowa yang memeluk agama Islam. Seperti dijelaskan di muka, bahwa yang mula-mula memeluk agama Islam di Gowa adalah Mangkubumi kerajaan Gowa/Raja Tallo ke VII Malingkaang Daeng Manyonri Karaeng Katangka. Beliau mulai memeluk Islam pada malam Jum'at 9 Jumadil-awal 1041 H, atau tanggal 22 September 1605. Sebagai raja yang mula-mula memeluk agama Islam di Sulawesi Selatan, maka Baginda digelar Sultan Abdullah Awwalul Islam. Ada dugaan, bahwa kemungkinan pada saat itu juga raja Gowa I Manggarai Dg. Manrabbia masuk Islam. Setelah beliau masuk Islam bergelar Sultan Alauddin¹².

Kedua raja tersebut di atas diislamkan oleh seorang ulama yang bernama "Abd. Makmur Khatib Tunggal" yang kemudian lasim disebut "Dato ri Bandang".

Perlu penulis kemukakan, bahwa di Sulawesi Selatan dikenal tiga orang sebagai penyebar agama Islam. Yang pertama ialah Khatib Tunggal atau Dato ri Bandang. Ia bersama dua orang temannya, yakni Khatib Sulaiman dengan gelar Datok ri Patimang dan Khatib Bungsu dengan gelar Dato' ri Tiro¹³.

Ketiga orang penyebar Islam tersebut masing-masing menyebarkan Islam pada tempat dan bentuk yang berbeda. Misalnya Dato' ri Bandang yang menyebarkan agama Islam yang mengutamakan pemahaman syari'at. Beliau menyebarkan Islam di daerah Gowa dan sekitarnya. Khatib Sulaiman atau Dato' ri Patimang menyebarkan

¹²Abd. Razak Dg. Patunruk, Ibud.h. 19 Bandingkan dengan analisa Noorduyn, Islamisasi Makassar, h. 12

¹³Sagimun, MD. Op.cit, h. 8

agama Islam di daerah kerajaan Luwu. Sedangkan Khatib Bungsu, mengajarkan Islam dengan jalan "Tassawui di Tiro sekitar daerah Bulukumba"¹⁴.

Setelah raja Gowa masuk Islam, sekaligus dijadikannya Islam sebagai agama resmi kerajaan, maka proses selanjutnya adalah pengembangan pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam itu sendiri. Perkembangan awal agama Islam di kerajaan Gowa ditandai dengan dilaksanakannya untuk pertamakalinya Shalat Jum'at di Tallo pada tanggal 9 November 1607 atau tanggal 19 bulan Rajab 1016 H¹⁵.

Perkembangan yang dimaksudkan disini, yakni adanya beberapa orang di kerajaan Gowa yang sudah memeluk agama Islam. Bahkan oleh Harun Kadir dkk mengatakan, bahwa pada tahun 1607 itu seluruh rakyat kerajaan Gowa (Makassar) sudah memeluk agama Islam¹⁶.

Dengan resminya agama Islam sebagai agama kerajaan Gowa, maka pada saat itu kerajaan Gowa merupakan pusat pengembangan syari'at Islam. Pada masa itu kerajaan Gowa berada dibawah kepemimpinan Sultan Alauddin sebagai raja Gowa ke XIV, sedangkan Sultan Abdullah Awwalul Islam (raja Tallo ke VI) menjabat sebagai Mangkubumi kerajaan Gowa. Dirangkapnya jabatan oleh Raja Tallo ke VI ini, sebagai realisasi dari kerjasama Gowa-Tallo, yang biasa dikenal dengan nama "Se're ata na rua Karaeng".

Dengan latarbelakang kerjasama dengan kerajaan-kerajaan Bugis, yang menyatakan bahwa "siapa yang mendapatkan kebaikan, harus disampaikan kebaikan-kebaikan itu kepada kerajaan-kerajaan lain". Namun usaha yang dilakukan oleh kerajaan Gowa ini mendapat hambatan dari kerajaan-kerajaan Gowa ini mendapat hambatan dari kerajaan-kerajaan Bugis seperti Bone, Soppeng, Wajo dan lain-lain.

¹⁴Abd. Razak. Dg. Patunruk, Op.cit. h. 19

¹⁵Sagimun, MD. Op.cit, h. 9

¹⁶Harun Kadir, et.al. Op.cit, h. 39

Dengan penolakan terhadap maksud baik kerajaan Gowa ini, sehingga akhirnya kerajaan Gowa mengirimkan ekspedisi militernya ke daerah-daerah. Sebagai hasilnya, yakni masuknya Islam kerajaan-kerajaan Bugis tersebut seperti Sidenreng dan Soppeng menerima Islam sebagai agama negara pada tahun 1609. Tahun 1610 Bone dan tahun 1611 kerajaan Wajo. Ini berarti, bahwa pada tahun 1611 ini, hampir seluruh daerah di Sulawesi Selatan sudah menganut agama Islam.

Bertolak dari proses Islamisasi di kerajaan Gowa di atas, terlihat bahwa dalam penyebaran agama dan pengembangannya keseluruh daerah di Sulawesi Selatan, peranan Gowa sangat menentukan. Walaupun proses pengislaman ini harus dilalui dengan peperangan, yang biasa dikenal perang Islam "Musu' Asselengang". Demikian pula peranan orang-orang Melayu tidak dapat diabaikan, yang berdiam di Gowa (Somba Opu sejak abad ke XVI).

3. Perang Makassar dan Penguasaan Belanda (VOC)

Perang Makassar dan penguasaan Belanda (VOC) apabila dikaitkan dengan pertumbuhan kota pantai Makassar, terjadi pada pergeseran Makassar ke Kompleks Benteng Ujung Pandang. Maksudnya bahwa sejak masuknya Belanda (VOC) yang diakhiri oleh perang dengan kerajaan GOWa dan dimenangkan oleh Belanda (VOC), praktis supermasi politik dan kekuasaan ada di tangan Belanda (VOC). Selanjutnya pergeseran kota pantai Makassar diperkuat oleh ditandatanganinya perjanjian Bongaya, yang menjadikan Benteng Ujung Pandang sebagai pusat pemerintahan Belanda.

Masuknya Belanda di Makassar berawal dengan diperkenalkannya orang-orang Belanda membuka perwakilan dagangnya di Makassar pada tahun 1603.

Pembentukan pemukiman dan pusat-pusat perdagangan orang-orang Belanda tersebut, memberikan kesempatan kepadanya untuk berdagang dan berhubungan dengan para penguasa pribumi. Dibentuknya perwakilan dagang Belanda di Makassar dengan management (pengelolaan secara organisatoris), untuk pertama kalinya dipimpin oleh Claes Leursen. Kondisi ini memungkinkan

orang-orang Belanda tersebut memperoleh keuntungan yang cukup besar. Keadaan yang harmonis ini hanya berlangsung sampai pada pergantian pimpinan perwakilan dagang Belanda di Makassar pada saat itu berada di tangan De Nijs¹⁷.

Pertikaian awal orang Makassar dengan Belanda, sejak De Nijs sebagai pimpinan perwakilan dagang Belanda, yang memberikan laporan kepada VOC yang isinya :

Bahwa raja Gowa tidak adil, yang menekan Belanda dan membedakan antar satu suku dengan yang lainnya¹⁸.

Dengan dasar itu, maka antara raja Gowa dan Belanda selalu terjadi kesalahpahaman, utamanya dalam hal kebijaksanaan-kebijaksanaan perdagangan. Keadaan seperti ini berlangsung mulai dari kepemimpinan raja Gowa ke XIV sampai raja Gowa XVI (Sultan Hasanuddin), yang diakhiri dengan perang Makassar dengan Belanda (VOC).

Pertikaian Makassar Belanda lebih jelas, sejak sebuah kapal Kompeni (VOC) Enkehuyzen berlabuh di Makassar yang dipergunakan oleh Kumpeni menjalankan tipu muslihatnya. Hal mana bahwa pada saat perjalanan sampai berlabuhnya kapal Kumpeni tersebut, menurutnya banyak mendapat gangguan dari orang-orang Melayu dan Portugis. Dengan dasar ini pula, sehingga orang-orang Melayu dan Portugis. Dengan dasar ini pula, sehingga orang-orang Belanda mengundang penguasa-penguasa Gowa (Raja Gowa ke XIV Sultan Alauddin). Setelah undangan tersebut dipenuhi, pembesar-pembesar Gowa dilucuti senjatanya, bahkan ditawan. Sejak itu pertikaian orang Belanda dengan orang Makassar bukan saja melalui Diplomasi, akan tetapi juga dalam bentuk bentrokan senjata. Keadaan ini semakin dipertajam sampai pada masa pemerintahan raja Gowa ke XVI (Sultan Hasanuddin).

¹⁷Mattulada, Op.cit, h. 49

¹⁸Ibid.

Pada masa pemerintahan raja Gowa ke XVI, hubungan Belanda dengan Makassar berada pada puncak ketegangannya. Yakni, bahwa dalam masa pemerintahan Sultan Hasanuddin ini, benteng-benteng pembantu benteng utama Somba Opu diserang dan akhirnya dikuasai oleh Kumpeni. Peperangan ini diakhiri oleh kekalahan Makassar, dengan ditandatanganinya perjanjian Bongaya (Bongaisck Vedrag) tahun 1667 oleh Sultan Hasanuddin. Seperti pada penjelasan di muka, bahwa penguasa Belanda (VOC) pertama di Makassar bertolak pada isi perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya tersebut salah satu isinya memberikan kesempatan kepada orang-orang Belanda untuk tinggal dan mengatur pemerintahannya di Benteng Ujung Pandang.

4. Masa Transisi

Makassar dalam masa transisi ini, berlangsung sejak penguasaan belanda (VOC) dengan perkampungan Belanda (Vlaardingennya), yang didukung oleh perkampungan-perkampungan orang Melayu, Bugis (Wajo dan Bone). Orang-orang Bone pada masa itu dipimpin oleh Arung Palakka. Perkembangan kota pantai Makassar dibawah kekuasaan belanda (VOC) sejak 1667 sampai pada akhir abad ke XVIII.

Masa peralihan ini terjadi sebagai konsekwensi dari kurang stabilnya keuangan Belanda menjelang tahun 1798. Merosotnya keadaan keuangan VOC ini, menyebabkan dibubarkannya pemerintahan Belanda, berdasarkan Straatregeling 1796 Oost Indische Compagni. Dengan segala untung ruginya dioper oleh Bataafsche Republik, sedangkan pimpinan urusan koloni diserahkan kepada sebuah dewan. Dewan ini bernama Raad Der Aziatische Bezettingen en Establiszementen yang mulai berfungsi tahun 1800²⁰.

Keadaan ini berlangsung sampai datangnya Inggris menguasai Indonesia pada tahun 1811²¹.

²⁰Daud Limbugau, SU. *Terbentuknya Wilayah Administrasi Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan 1824-1874*. Jogjakarta : Tesis Pasca Sarjana UGM, 1985, h. 53

²¹Ibid, h. 53

Kekuasaan Inggris ini, berlangsung hingga tahun 1816, dengan diadakannya penyerahan kembali daerah-daerah kekuasaan Inggris kepada Belanda. Hal ini didasarkan pada perjanjian pemerintah Inggris dan Belanda, dimana Inggris harus menyerahkan kekuasaan kepada Belanda.

Dengan dasar itu, sehingga penguasaan kembali Hindia Belanda di Makassar, diawali oleh penandatanganan pembaharuan perjanjian Bongaya pada tahun 1824²².

5. Masa Hindia Belanda

Dalam masa pemerintahan Hindia Belanda, sistem politik yang direalisasikan dalam bentuk pemerintahan terdapat dua bahagian, walaupun dalam struktur yang satu. Struktur pemerintahan seperti ini, dimaksudkan agar sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah Belanda dapat terwujud. Sasaran tersebut, yakni terlaksananya penguasaan atau penjajahan pada daerah-daerah yang didudukinya. Sasaran lain, yakni terpenuhinya usaha-usaha pemenuhan kebutuhan materil untuk menanggulangi kerugian-kerugian (utang) pemerintah. Kerugian ini muncul sebagai akibat peperangan antara pemerintah Hindia Belanda dengan Pangeran Diponegoro. Perang Paderi dan di Nederland sendiri Belanda menghadapi Belgia tahun 1831²³.

Struktur pemerintahan Hindia Belanda, yakni Gubernur Jenderal, Gubernur, Asisten Residen, Kontrolir, Regent dan Kepala Kampung²⁴. Dengan wilayah administrasi terbagi atas Gewest, Afdeling, Onderafdeling dan Distrik. Dalam struktur pemerintahan di atas, Regent merupakan kepala pemerintahan tertinggi pribumi yang berada langsung dibawah pimpinan Onderafdeling (Kontrolir).

Penempatan lembaga pemerintahan pribumi dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda, disamping sebagai penguasa di wilayah administrasinya juga sekaligus sebagai penghubung antara ma-

²³Daud Limbugau, SU. Ibid, h. 67

²⁴Lihat Struktur pemerintahan Kolonial (terlampir)

syarakat dan pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dimaksudkan agar usaha pemenuhan kebutuhan (seperti pemungutan pajak) dapat terlaksana dengan baik.

Dalam struktur pemerintahan seperti ini, sebagai konsekwensi nya bagi pemerintah/penguasa pribumi, yakni bahwa pajak-pajak pendapatan sebelumnya (pemotongan pajak, dan hasil-hasil tanah kerajaan) tidak lagi dapat dinikmati oleh para penguasa pribumi.

Sebagai gambaran tentang pendapatan pemerintah Hindia Belanda dari pajak hasil bumi, sebagai berikut :

Daftar Penerimaan Pajak Hasil Bumi
(Panen Padi) tahun 1856-1860

Tahun	Penerimaan
1856	f. 45.680,56
1857	f. 128.338,83
1858	f. 123.237,70
1960	f. 128.530,64

Data ini diperoleh dari Administratif Verslag Van Het Gouvernement Celebes en onderhonigheden th. 1860 (Bahan arsip Nasional, Bundel Makassar no.8/2). Lihat pada lampiran I A. Daud Limbugau. Terbentuknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Hindia Belanda di Sulawesi Selatan tahun 1824-1874. h. 112

Keadaan pemerintah Hindia Belanda seperti di atas, berlangsung sampai Belanda dapat menstabilisir keadaan di kota ini (Fort Rotterdam dan Vlaardingen) dan tersusunnya organisasi kekuasaan Hindia Belanda. Dimana pada tahun 1906 Makassar dijadikan Gemente (kota Madya) dalam struktur wilayah kekuasaan Hindia Belanda²⁵.

²⁵Mattulada. Op.cit, h. 158

Keadaan ini berakhir pada saat kekalahan Belanda dari Pemerintah Jepang dalam PERang Dunia II.

6. Masa Pendudukan Jepang

Struktur pemerintahan dan penguasaan di Makassar sampai pada pemerintahan Jepang telah mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan tersebut, baik dari susunan pemerintahannya, maupun status wilayahnya. Perubahan seperti ini sesuai dengan keinginan penguasa (pemegang hegemoni kekuasaan), atau bahkan dipengaruhi oleh tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Pendudukan Jepang juga demikian halnya.

Ketika pecah perang dunia ke II, tentara Jepang menyerang negara-negara dan daerah jajahan yang ada di Asia. Satu demi satu diseruduk dan didudukinya. Hindia Belanda dengan mudah pula didudukinya, tanpa perlawanan yang berarti. Penjajahan Hindia Belanda dalam waktu sekejap digantikan oleh penjajahan Jepang, termasuk diseluruh Indonesia dan Makassar (Sulawesi Selatan khususnya). Segera setelah tentara Jepang dapat menduduki wilayah bekas jajahan Hindia Belanda, sejak tanggal 9 Februari 1942²⁶, ia menyusun pemerintahan di daerah pendudukannya.

Mengenai struktur pemerintahan Jepang di wilayah bekas jajahan Hindia Belanda, dijelaskan dalam Osamu Seirei (Undang-Undang Osamu) No.1/1942²⁷. Pasal 1 Osamu Seirei tersebut, membagi kekuasaan Jepang terhadap bekas wilayah jajahan Hindia Belanda, sesuai dengan tentaranya :

1. Daerah yang dikuasai dan diawasi oleh Angkatan Darat meliputi :

²⁶Ma'Moen Noeh, "Detik-Detik Bersejarah Daerah Kota Makassar", dalam Sikado Dg. Nai dkk. Kenangan 50 tahun Berotonomi Daerah Kota Makassar 1906-1 April 1956. Pemda Kota Makassar, 1956, h. 24

²⁷Bayu Suryaningrat. Sejarah Pemerintahan di Indonesia, Babak Hindia Belanda dan Jepang. Jakarta : Dewaruci Press, 1981. h.68

²⁸Ibid, h. 69

- a. Sumatera yang dikuasai oleh Angkatan Darat (Rikugun) ke 16
- b. Jawa-Madura, yang dikuasai oleh Angkatan Darat ke 25
2. Daerah yang dikuasai dan diawasi oleh Angkatan Laut (Kai-gun) meliputi selebihnya dari wilayah Hindia Belanda.

Sesuai dengan pasal 1 Osamu Seirei tersebut, terlihat bahwa Makassar sendiri berada di bawah penguasaan dan pengawasan Angkatan Laut (Kei-gun).

Adapun susunan pemerintahan Jepang di daerah, dijelaskan pada pasal 4 Osamu Seirei, sebagai berikut :

Struktur Pemerintahan Jepang di Daerah

Urutan tahap	Nama Wilayah	Pejabat (Kepala)
	Syuu (Karesidenan)	Syuucokan (Residen, hanya dijabat oleh orang Jepang)
	Ken dan Si (Kabupaten dan Kota Madya)	Ken-co dan Si-co (Bupati dan Wali-kotamadya. Dijabat oleh orang Pribumi)
	Gun (Kawedanan atau Distrik)	Gun-so (Wedana)
	Son (Kecamatan)	Son-co (Camat)
	Ku (Desa)	Ku-co (Kepala Desa)

Sumber data : Drs. Bayu Suryaningrat, h. 71

Berdasarkan susunan pemerintahan Jepang, menunjukkan, bahwa Makassar berada dibawah pimpinan seorang Si-co (Walikotamadya) dengan status wilayah Si.

Keadaan seperti berlangsung hingga dikalahkannya Jepang oleh Sekutu. Kekuasaan Jepang berakhir di Makassar pada tanggal

5 Agustus 1945²⁹.

Setelah penguasaan Jepang, Indonesia memasuki babak baru, yakni masa Kemerdekaan. Walaupun pergolakan-pergolakan politik masih tetap berjalan, termasuk di Makassar.

7. Masa Kemerdekaan

Sejak pengenalan Makassar, telah mengalami perubahan-perubahan status. Perubahan tersebut baik karena kedudukan politik, juga karena perubahan status wilayah. Kota Makassar yang pada awalnya merupakan ibu negeri kerajaan Gowa sejak berada di Somba Opu, kemudian sebagai ibu kota Gewest, dan terakhir sebagai ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan. Demikian pula perubahan-perubahan status kota itu sendiri. Perubahan ini menyangkut statusnya seperti perubahan kota bandar menjadi kotamadya. Perubahan ini terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Pada tahun 1906, kota pantai Makassar untuk pertama kalinya berstatus sebagai Kotamadya. Saat itu Makassar ditetapkan sebagai suatu daerah otonom. Penetapan itu berdasarkan lahirnya Ordonansi tanggal 12 Maret 1906 (Staat Blad 1906 No. 171). Sejak itu Makassar disebut "Gemeente Makassar"³⁰. Dalam Ordonansi itu pula, dijelaskan mengenai sistim pemerintahan yang berlaku di Makassar yang disebut "de Gemeente rad van Makassar". Dewan perwakilan untuk Gemeente Makassar itu terdiri dari 13 orang, yang masing-masing 8 orang dari bangsa Belanda, 3 orang dari Indonesia asli dan 2 orang timur Asing³¹. Gemeente Makassar sendiri dikepalai oleh seorang kepala pemerintahan, yang disebut Asisten Residen (A.R).

Sejak masa kemerdekaan, Undang-Undang Pokok Pemerintah Daerah di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan.

²⁹Dg. Sikado Dg. Nai dkk. Op.cit, h. 24

³⁰Ibid, h. 20. Lihat juga A. Husain dkk, h.9-10.

³¹Ibid, h. 21

Perubahan-perubahan itu, yakni sejak tahun 1957 dengan Undang-Undang tersebut tidak lama berlaku, yang kemudian diganti pada tahun 1959. Pada tahun 1959 tersebut sistim pemerintahan di daerah didasarkan pada :

- a. Penetapan Presiden No.6 tahun 1960 (disempurnakan) dan
- b. Penetapan Presiden No.5 tahun 1960 (disempurnakan) jo Penetapan Presiden No.7 tahun 1965³².

Di Sulawesi Selatan, penyerahan wewenang pemerintah umum pusat kepada daerah, bagi daerah Tingkat I dan II, baru terwujud pada tanggal 28 Desember 1965 atas dasar Undang-Undang No.6 Tahun 1959, dan peraturan pemerintah No.50 tahun 1963. Untuk daerah-daerah Tingkat II terealisasi dengan adanya Undang-Undang Pokok Pemerintah Daerah No.18 tahun 1965, yang bagi daerah Kotapraja Makassar mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1966. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Pemeirntah Daerah No.18 tahun 1965 tersebut, kotapraja Makassar dirubah menjadi Kotamadya Makassar (Kotamadya Ujung Pandang, sic).

Demikianlah Makassar yang berproses sampai sekarang.

³²A. Husain dkk. Makassar Menuju Sosialisme, 1956 Makassar: Pemda Kodya Makassar, h. 9

VI

TINJAUAN AKHIR

Kelahiran awal kota pantai Makassar, sangat ditentukan oleh letak geografis dan kondisi politik. Kondisi politik, yakni lahirnya kerajaan Gowa sebagai satu kerajaan yang berdaulat. Sedangkan letak geografis, yakni ditempatkannya pusat pemerintahan kerajaan Gowa pada daerah pantai (Selat Makassar). Berdasarkan pendukung utama kelahiran kota pantai Makassar di atas, maka pada dasarnya kota pantai Makassar lahir secara "Alamiah".

Pada pertumbuhan tahap awal kota pantai Makassar, faktor-faktor pendukung selain faktor geografis, politik, juga dipengaruhi oleh zone-zone pelayaran dan pergeseran pusat-pusat perdagangan di Asia Tenggara. Pertumbuhan tahap awal yang dimaksudkan disini, adalah sejak jatuhnya Malaka 1511. Dengan jatuhnya Malaka, pusat-pusat pelayaran dan perdagangan bergeser ke Sumatra dan Jawa (Aceh, Gresik, Banten dan Tuban). Kondisi ini memberikan posisi yang semakin baik kepada kota pantai Makassar (pada saat itu Somba Opu) untuk berkembang menjadi kota niaga atau kota bandar.

Berkaitan dengan jatuhnya Malaka, pergeseran pusat pelayaran dan perdagangan, letak geografis dan dukungan ekonomi, merupakan pendukung pertumbuhan kota pantai Makassar. Pembuktian ini dapat dilihat pada tahun 1624 kota pantai Makassar (Somba Opu) menjadi kota dagang terbesar ke VI di Asia

Letak geografis Makassar yang berada pada jalur transito antara pelayaran Nusantara arah barat dengan pelayaran arah Timur, dan kemampuan ekonomi rakyat sangat mendukung. Jadi lahirnya pusat perdagangan di Aceh, Gresik, Banten dan Tuban di arah Barat dan bandar Maluku di arah Timur, pada gilirannya kota pantai Makassar akan berkembang sebagai sebuah kota dagang yang besar. Tambahan lagi, bahwa pada pertumbuhan tahap awal ini, di Makassar lagi, bahwa pada pertumbuhan tahap awal ini, di Makassar (Somba Opu) telah mulai datang orang-orang asing. Bahkan diantara

mereka ada yang tinggal untuk berdagang (Portugis, Melayu, Pahang, Petani, Johor). Sehingga secara komunitas kota pantai Makassar semakin berkembang.

Pertumbuhan kota pantai Makassar tahap awal, peta pelayaran masyarakatnya (peta pelayaran tradisional), yakni arah barat Jawa (Gresik, Banten dan Tuban) terus ke arah utara yaitu Aceh, Malaka dan Johor. Sedangkan pelayaran arah timur yaitu Maluku/Banda. Masih dalam tahap awal ini, peta pelayaran orang-orang Makassar (bugis Makassar) berubah. Perubahan ini terjadi dengan bertambahnya daerah-daerah pelayarannya. Pertambahan ini meliputi Eropa, Goa (India) dan Australia.

Pertumbuhan kota pantai Makassar tahap ke dua, ditandai dengan penguasaan Belanda (VOC) di Makassar.

Penguasaan ini diawali dengan pendudukan Belanda (VOC) di Benteng Ujung Pandang. Pertumbuhan tahap ke dua, sekaligus pergeseran kota pantai Makassar secara geografis sebagai pengaruh dari peralihan kekuasaan (kondisi politik). Pergeseran ini sebagai konsekuensi penandatanganan perjanjian Bongaya (Bongaisch Verdrag).

Dalam pertumbuhan kota pantai Makassar tahap ke dua (secara geografis berada pada Ujung Pandang sekarang), tidak mengalami rute pelayaran, dan perdagangan. Bahkan pada tahap ini, penulis melihat bahwa perdagangan di Makassar mengalami penurunan. Penurunan ini utamanya mengenai komunitas pendukung pelayaran dan perdagangan dari dan ke Makassar. Hal ini terjadi sebagai akibat dari monopoli perdagangan Belanda (VOC). Keadaan seperti ini berlangsung hingga penguasaan kembali Hindia Belanda, setelah penguasaan Inggris. Ini didasarkan pada penataran pemerintahan Hindia Belanda yang semakin terarah. Maksudnya bahwa penguasaannya lebih terorganisir. Misalnya dengan masuknya orang-orang pribumi pada struktur pemerintahan.

Pertumbuhan tahap ke tiga, sebagai tahap perkembangan kota pantai Makassar, berawal dari hilangnya penjajahan di Nusantara termasuk Makassar. Karena dengan demikian secara politis ada kebebasan untuk menata dan mengembangkannya. Bersamaan dengan

itu pula, modernisasi mulai menyentuh aspek-aspek kehidupan masyarakat (misalnya dikenalnya motorisasi perahu layar).

Mulai saat ini, penataan Makassar dari segala aspeknya semakin ditingkatkan, hingga perkembangan yang ada sekarang.

Bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya kota pantai Makassar, baik sebagai kota niaga/bandar niaga, pusat pemerintahan dan pusat perdagangan, maka dengan sendirinya akan terjadi benturan-benturan budaya. Dari komunitas pendukungnya. Benturan-benturan budaya ini terjadi, sebagai akibat dari hubungan timbal balik, dilatarbelakang kehidupan yang berbeda.

Benturan-benturan budaya pada dasarnya mengarah pada tiga bentuk. Pertama terjadinya pola baru sebagai hasil perpaduan budaya; ke dua hilangnya salah satu budaya dan ke tiga penolakan atas budaya di atas budaya yang datang.

Sehubungan dengan benturan-benturan budaya yang terjadi di Makassar, sampai pad paroh abad ke XX, ketiga hasil benturan budaya di atas terjadi.

Terbentuknya pola budaya baru sebagai akibat dari akulturasi, misalnya dapat dilihat pada sistim pemerintahan. Terbentuknya pola baru yang dimaksudkan, adalah adanya struktur pemerintahan pribumi disamping pemerintahan Belanda (Hindia Belanda). Demikian juga pada aspek-aspek keagamaan. Pembauran budaya ini, menghasilkan budaya yang berpola baru. Misalnya pada bangunan-bangunan mesjid yang dipengaruhi arsitektur bangunan tradisional dan pola arsitektur Islam. Pola baru disini, karena masing-masing pola budayanya, harus dimunculkan pada bangunan (hasil budaya) yang sama. Dapat juga dilihat pada relief-relief nisan, makam dan istana.

Hilangnya salah satu bentuk budaya, dapat dilihat pada bangunan (gedung Benteng Ujung Pandang), yang dalam arsitektur bangunannya tidak menampakkan sama sekali ciri bangunan arsitektur tradisional. Hal ini juga terjadi dalam segi keyakinan keagamaan. Maksudnya bahwa penerimaan suatu keyakinan keagamaan oleh masyarakat (anggota masyarakat), dengan sendirinya keyakinan yang ada sebelumnya harus dihilangkan (konsekwensi dari penerimaan

keyakinan keagamaan sebagai suatu dogma).

Sementara penolakan kebudayaan asing, juga terjadi di Makassar. Penolakan ini misalnya terjadi pada jual beli, khususnya pada masa-masa awal perkembangan perdagangan di Gowa. Dalam masyarakat pribumi dikenal sistim tradisional (barter), sementara orang asing (barat) datang dengan sistim jual beli dengan sarana jual belinya. Disini penulis mendukung analisa Van Leur, bahwa pada abad 17 dan 18 Kumpeni justru mengikuti pola-pola perdagangan tradisional, termasuk di Makassar. Hal ini dimungkinkan karena pengenalan sistim nilai (mata uang) bagi masyarakat Makassar secara umum belum menyeluruh. Sementara sisi lain sebagai alternatif untuk membentuk pola baru belum memungkinkan. Jadi walaupun dalam sistim barter itu dipergunakan mata uang, tatap penentuan sistim nilainya ditentukan oleh jumlah atau nilai barang untuk ukuran pribumi. Tambahan lagi, bahwa pada masa awal pusat-pusat kegiatan ada ditangan raja. Berarti masyarakat umum belum berkesempatan untuk mengadakan transaksi jual beli secara langsung dengan bangsa-bangsa asing. Walaupun sistim jual beli dengan penakaaian mata uang sebagai sarana jual beli, sejak abad ke XIX mulai diterima. Hal ini didasarkan pada adanya orang-orang pribumi yang masuk dalam struktur pemerintahan seperti Hindia Belanda. (lihat perangkat pemerintahan Gemeente Makassar).

Berkaitan dengan penguasaan asing di Makassar, penulis melihat, bahwa penguasaan secara total terhadap masyarakat Makassar khususnya dan Sulawesi Selatan umumnya, nanti pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Penguasaan itu juga terjadi pada masa pemerintahan/pendudukan Jepang. Karena pada masa ini (Hindia Belanda), walaupun ada orang-orang pribumi yang masuk dalam perangkat pemerintahan, pada dasarnya hanya sebagai alat. Termasuk yang dimaksudkan disini, kelanjutan dari format pemerintahan kerajaan (Gowa misalnya sampai pada tahun 1946 atau raja Gowa yang ke 36). Sedangkan pada penguasaan sebelumnya Belanda (VOC), penguasaannya sendiri dibayang-bayang oleh peperangan. Sehingga pendapat, bahwa abad 17, 18 adalah jaman perang Makassar, adalah benar.

BIBLIOGRAFI

- Abdullah, Taufik . ed. 1985. Sejarah Lokal di Indonesia Kumpulan tulisan. Jogjakarta : Gajah Mada University Press.
- _____, ed. 1983. Agama dan Perubahan Sosial. Jakarta: CV. Rajawali.
- Bachtiar, Harsya, W. 1980. "Birokrasi dan Kebudayaan" Dalam : Analisis Kebudayaan. Jakarta : Depdikbud, th. 1980 ed. th. II No.2 81/82.
- Boeke. J.H. dan D.H.Burger. 1974. Ekonomi Dualistis : Dialog Antara Boeke dan Burger. Jakarta : Bhratara.
- Husain, A. 1966. Makassar Menuju Sosialisme. Pemda Kotamadya Makassar.
- Hall, D.G.E. A Short History of South East Asians. Diterjemahkan oleh : Drs. I.P. Soewarsha Sejarah Asia Tenggara. Surabaya : Usaha Nasional.
- Katodirdjo, Sartono. dan Djoko Suryo. 1992. "Perkenalan Dengan Sejarah Perkebunan" dalam : Prisma ed. ke.4 Jakarta: LP3ES.
- _____, 1991. Sejarah Perkebunan di Indonesia" Kajian Sosial Ekonomi. Jogjakarta : Aditya Media.
- _____, 1988. Struktur Kekuasaan, Sistem Fiskal dan Perkembangan Pedesaan. Jakarta : UI Press.
- _____, et.al. 1975. Sejarah Nasional Indonesia. Jld. III. Jakarta : Depdikbud.
- Koentjaraningrat, ed. 1984. Masyarakat Desa di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kadir, Harun. et. al. 1978. Sejarah Daerah Sulawesi Selatan. Jakarta: Depdikbud.

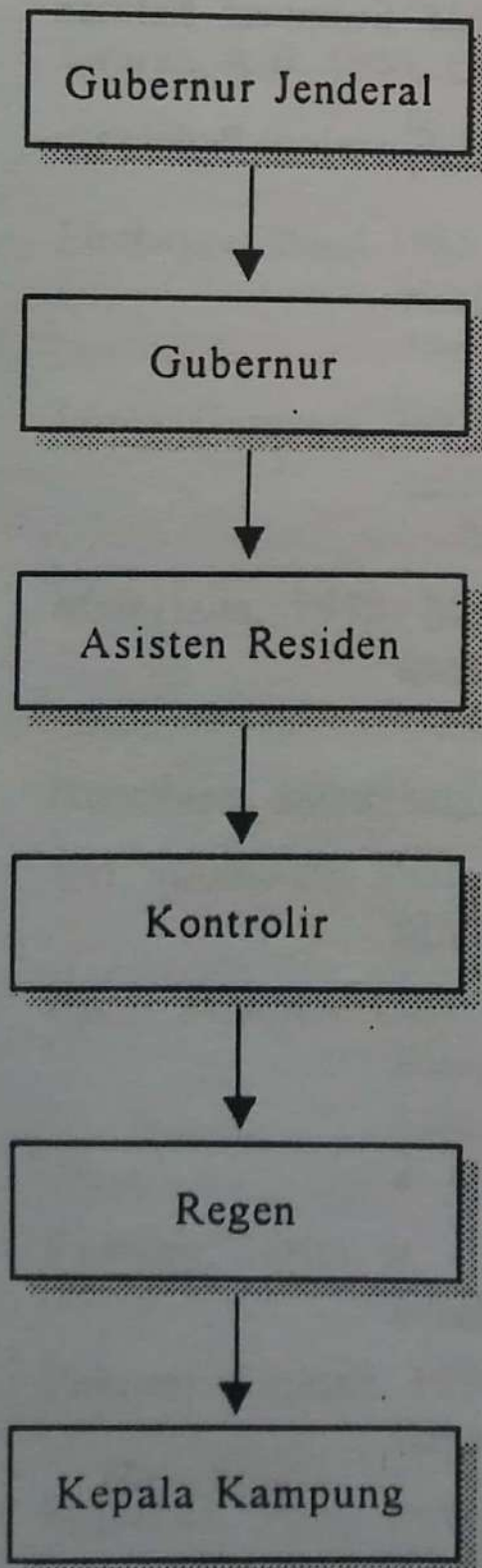
- Kolff, G.H.Van Der. 1974. Ekonomi Asli dan Asing Sama dan Berlainan. Jakarta : Bhratara.
- Korn.V.E.1972. Pandangan Timur Terhadap Pemerintah Barat. Jakarta : Bhratara.
- Leur.J.C. 1971. Abad ke 18 Sebagai Kategori Dalam Penulisan Sejarah Indonesia. Jakarta : Bhratara.
- Lapian, A.B. 1984. Perebutan Samudera : Laut Sulawesi Pada Abad ke XVI dan XVII. Dalam Majalah Prisma No.11. 1984.
- Limbugau, Daud. 1985. Terbentuknya Wilayah Administrasi Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan 1824-1874. Jogjakarta : Tesis Pasca Sarjana. UGM.
- Louis, Gotschalk. 1983. Understanding History : A Primer of Historical Method. Diterjemahkan oleh Nugro. . . . osusanto : Mengerti Sejarah. Jakarta : UI Press.
- Mattulada, 1982. Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah. (1510-1700). Ujung Pandang. Bhakti Baru - Berita Utama.
- Noorduyn. Islamisasi Makassar. Jakarta : Bhratara.
- Nai, Sikado Dg. 1956. Kenangan 50 Tahun Berotonomi Daerah Kota Makassar. Makassar : Pemda Kodya Makassar.
- Paeni, Mukhlis. 1988. Metodologi Penulisan Sejarah. Makalah pada kompreksi dan temu ilmiah Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Sulsel. 10 - 11 Desember 1988, di Ujung Pandang.
- Pawiloy, Sarita. et. al. 1981. Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan. Ujung Pandang : Depdikbud.
- Pabittei, Aminah. 1976. Benteng Ujung Pandang. Ujung Pandang : Kantor Cabang II Lembaga S arah dan Antropologi
- Patunruk, Abd. Razak. 1983. Sejarah Gowa. Ujung Pandang : Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.

- Suryo, Djoko. 1989. Pertumbuhan Kota-Kota Pantai Nusantara. Makalah yang disajikan pada seminar MSI ke III di Ujung Pandang.
- Surianingrat, Bayu. 1981. Sejarah Pemerintahan di Indonesia Babak Hindia Belanda dan Jepang. Jakarta : Dewaruci Press.
- Tobing., P.H.O.L. 1961. Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa. Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan Makassar.
- Wiriaatmadja, Soelanar. 1989. Pokok-Pokok Sosiologi Pedesaan. Jakarta : CV. Yasaguna.

Lampiran : I

SKEMA

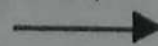
STRUKTUR PEMERINTAHAN KOLONIAL



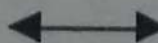
Keterangan

Kepala kampung tidak termasuk dalam struktur pemerintahan kolonial, tetapi ia merupakan pembantu utama regen, dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala distrik, atau kepala pemerintah pribumi.

Dewan adat bukan lembaga kolonial, melainkan adalah lembaga pemerintahan pribumi, yang tugas utamanya mengangkat dan memberi nasihat pemimpin nasihat pemimpin negeri.



Garis perintah



Garis konsultasi/musyawarah



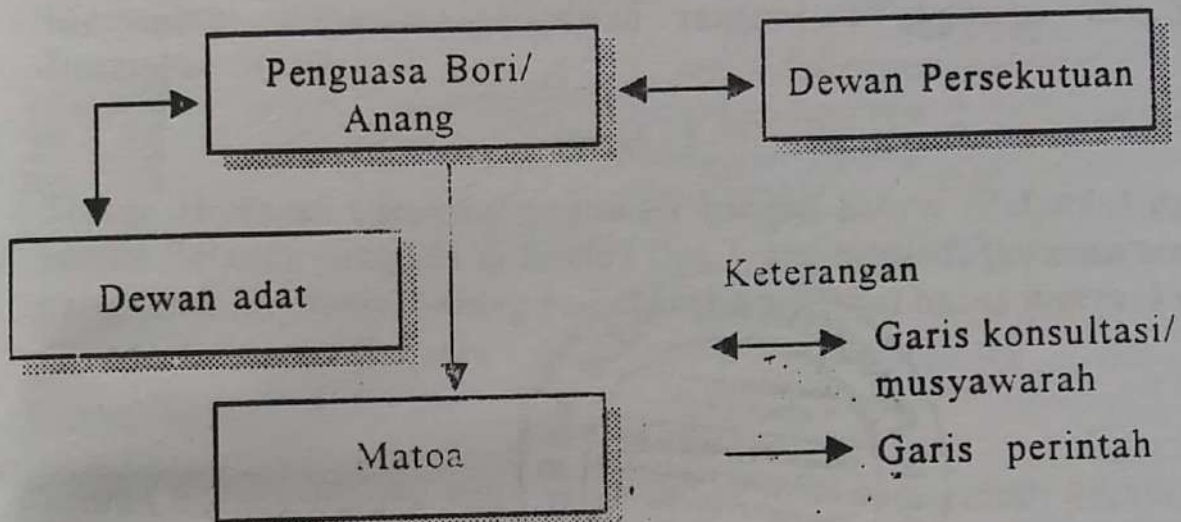
Dewan Adat

Lampiran : II

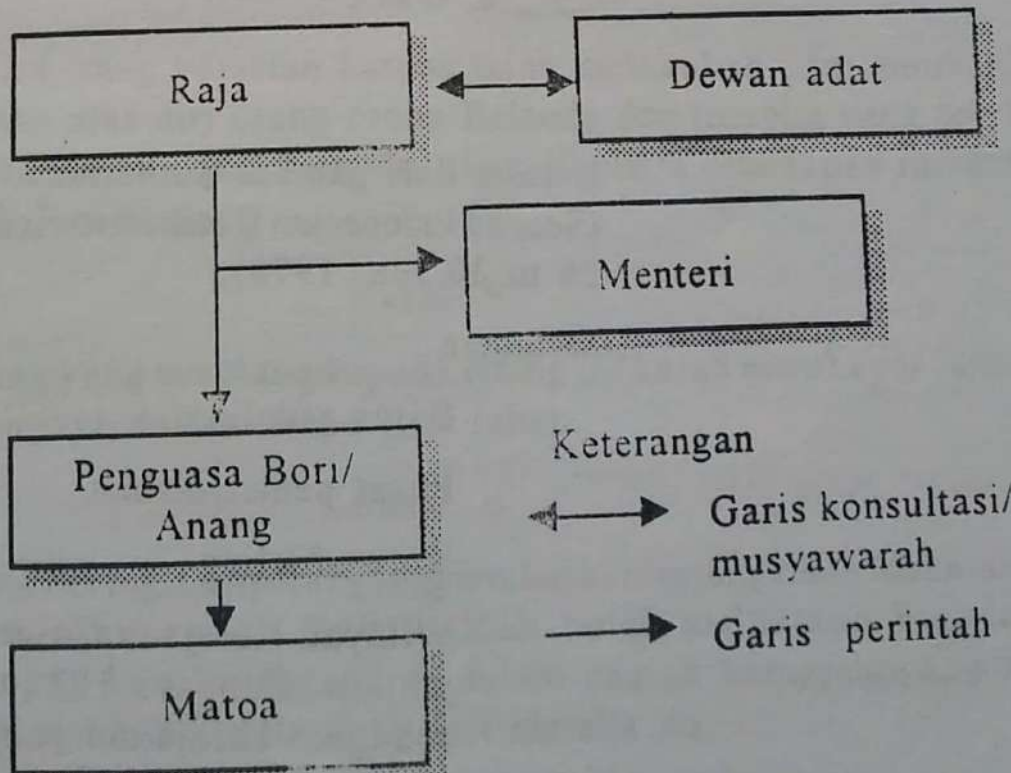
SKEMA

STRUKTUR PEMERINTAHAN TRADISIONAL

A. Bentuk konfederasi



B. Bentuk Kerajaan



Lampiran : IV

Isi pokok perjanjian Bungaya tanggal 18 Nopember 1667 adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Menyetujui perjanjian-perjanjian tanggal 19 Agustus dan 21 Desember 1667

Pasal 2

Semua Hienaren (pegawai-pegawai) bangsa Eropa (Belanda) dan rakyat Belanda yang ada di Somba Opu (yang menjadi tawanan atau yang telah lari menyeberang pada kerajaan Gowa) harus diserahkan kepada Kompeni Belanda.

Pasal 3

Semua barang-barang yang telah disita oleh pemerintah kerajaan Gowa yang berasal dari kapal-kapal Belanda yang pernah atau tidak kandas dan dirusakkan, harus diserahkan kepada Kompeni Belanda.

Pasal 4

Orang-orang yang bersalah karena telah melakukan pembunuhan-pembunuhan atas diri orang-orang Belanda dan mereka yang telah merusakkan kapal kapal Belanda, akan dihukum dihadapan residen Belanda di Jumpangang.

Pasal 5

Orang-orang yang berutang kepada Kompeni harus membayar lunas segala utangnya dalam tempo satu tahun.

Pasal 6

Orang-orang Portugis dan orang Inggeris harus meninggalkan Makassar sebelumnya akhir tahun. Sultan tidak boleh meluaskan bangsa-bangsa Eropah lain berdagang di dalam daerah kerajaannya, pun tidak boleh menerima duta-duta dari mereka itu.

Pasal 7

Hanya kepada Kompeni saja diberikan hak untuk menjual di Jumpandang barang-barang import yang penting. Pelanggar-pelanggar hukum akan dihukum dan barang-barang yang bersangkutan akan disita untuk keuntungan Kompeni. Kain-kain yang dibuat di daerah-daerah pesisir timur dan Jawa tidak termasuk dalam larangan itu.

Pasal 8

Kompeni bebas dari semua bea dan kewajiban-kewajiban pada pemasukan dan pengeluaran barang-barang.

Pasal 9

Orang-orang Makassar tidak boleh berlayar selain dari pada ke Bali, Betawi, Bantau, Jambi, Palembang, Johor, Borneo untuk mana mereka harus mempunyai surat pas.

Pasal 10

Benteng-benteng pertahanan Barombong, Panakkulang, Garassi, Mariso dan lain-lainnya harus dirombak. Jika tidak boleh, dimanapun, didirikan benteng-benteng pertahanan baru. Hanya benteng Somba Opu yang besar itu akan tinggal untuk kerajaan Gowa.

Pasal 11

Benteng Jumpandang bersama perkampungan dan tanah yang termasuk lingkungannya akan diserahkan kepada Kompeni Lji Kompeni akan didirikan kembali.

Pasal 12

Mata uang Belanda berlaku di Jumpandang.

Pasal 13

Sultan Kerajaan Gowa akan membayar kepada Kompeni ongkos perang sebesar 250.000 ringgit, ditambah dengan denda yang terdiri dari 1000 orang budak laki-laki dan perempuan yang muda, sehat dan dewasa atau utang sebesar harga dari budak-budak itu.

Pasal 14

Kerajaan Gowa harus menyerahkan Bima dan daerah-daerah takluknya kepada Kompeni.

Pasal 15

Raja Gowa akan berusaha menyerahkan raja Bima, raja Dompu, raja Tambora dan raja Sanggar yang kesemuanya bersalah telah mengadakan pembunuhan atas orang-orang Belanda di Bima. Juga Karaeng Bontomarannu harus diserahkan kepada Kompeni.

Pasal 16

Sultan harus melepaskan segala haknya atas kerajaan Buton.

Pasal 17

Sultan harus melepaskan segala haknya atas pulau-pulau Sula dan lain-lain pulau yang termasuk kekuasaan Ternate, seperti : Selayar, Muna dan seluruh daerah-daerah dipesisir Timur Sulawesi, yaitu mulai dari sana sampai Manado, pulau-pulau Bánggai, Gapi dan lain-lainnya yang terletak antara Mandar dan Manado, seperti Lambagi, Kaidipan, Buwol, Toli-Toli, Dampelas, Balaisang, Silensak dan Kaili.

Pasal 18

Pemerintah kerajaan Gowa harus melepaskan kekuasaannya atas kerajaan Bone dan kerajaan Luwu dan harus berjanji akan memerdekakan Datu Soppeng (La Tenribali) dari pengasingannya.

Pasal 19

Pemerintah kerajaan Gowa selanjutnya menyatakan akan mengakui raja Laiya dan raja Bangkala bersama seluruh Tanaturatea dan Bajeng dan daerah takluknya, yang kesemuanya sementara dalam peperangan telah datang kepada Kompeni, sebagai raja-raja yang bebas tanpa sesuatu hak atas mereka itu.

Pasal 20

Semua negeri yang dalam peperangan dialihkan oleh Kompeni bersama sekutu-sekutunya, terhitung mulai dari Bulu-Bulu sampai Bungaya akan menjadi dan tetap sebagai negeri-negeri milik yang telah dimenangkan oleh Kompeni bersama sekutu-sekutunya menurut hukum perang, kemudian bilamana raja Bakke' dan raja Appanang datang, maka negeri-negeri tersebut akan diperlakukan sesuai dengan hak Kompeni atas daerah-daerah disebelah Utara Makassar.

Pasal 21

Pemerintah kerajaan Gowa menyatakan akan melepaskan haknya atas Wajo, Bulu-Bulu dan Mandar yang kesemuanya dianggap durjana terhadap Kompeni, dan sekutu-sekutunya dan negeri-negeri tersebut akan diperlakukan oleh Kompeni dan sekutu-sekutunya menurut kehendak Kompeni.

Pasal 22

Pemerintah kerajaan Gowa akan menutup negerinya untuk bangsa-bangsa lain. Bilamana pemerintah kerajaan Gowa tidak mampu menolak mereka itu untuk tinggal di Jumpandang, maka pemerintah kerajaan Gowa akan meminta bantuan Kompeni yang ia akui sebagai pelindungnya, dengan kewajiban selanjutnya, bahwa ia akan membantu Kompeni terhadap musuh-musuh Kompeni dan ia tidak akan mengadakan permusyawaratan-permusyawaratan dengan negara-negara yang berperang dengan Belanda.

Pasal 23

Berdasarkan pasal-pasal yang tersebut di atas ini, maka dibuatlah oleh Sultan bersama pembesar-pembesar kerajaannya suatu perjanjian perdamaian, persahabatan dan persekutuan (bond-genootschap), di dalam mana termasuk raja-raja dari Ternate, Tidore, Bacan, Buton, Bone, begitupun Bima dan tuan-tuan tanah dan raja-raja yang kemudian akan meminta masuk dalam persekutuan ini.

Pasal 24

Kompeni akan mengambil keputusan di dalam perselisihan-perselisihan di antara anggota-anggota sekutu. Bilamana ada satu pihak yang tidak mau mengindahkan perantaraan yang diberikan oleh Kompeni, maka di mana perlu semua anggota sekutu memberi bantuan kepada pihak yang lain itu.

Pasal 25

Dua orang yang terkemuka dari majelis pemerintahan di Gowa akan berangkat bersama Speelman ke Betawi untuk meminta pengesahan dari Gubernur Jenderal atas perjanjian perdamaian-perdamaian tersebut. Gubernur Jenderal, jika ia kehendaki, akan suruh tinggal di Betawi dua orang putera dari Sultan sebagai jaminan.

Pasal 26

Untuk mewujudkan apa yang ditetapkan pada pasal 6, Kompeni akan angkut orang-orang Inggeris bersama barang-barangnya ke Betawi.

Pasal 27

Untuk mewujudkan apa yang ditetapkan pada pasal 15, maka bilamana dalam tempo sepuluh hari raja Bima dan Karaeng Bontomarannu tidak terdapat dan diserahkan kepada Kompeni, putera-putera mereka itu harus diserahkan kepada Kompeni.

Pasal 28

Sultan berjanji akan membayar kepada Kompeni 250.000 ringgit sebagai pembayaran ongkos perang yang harus dilunaskan dalam lima musim berturut-turut.

Pasal 29

Perjanjian ini ditandatangani atas sumpah pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 1662 di Bongaya.

Isi Pokok Perjanjian Bungaya yang dibaharui tanggal 9 Agustus 1824 adalah sebagai berikut :¹

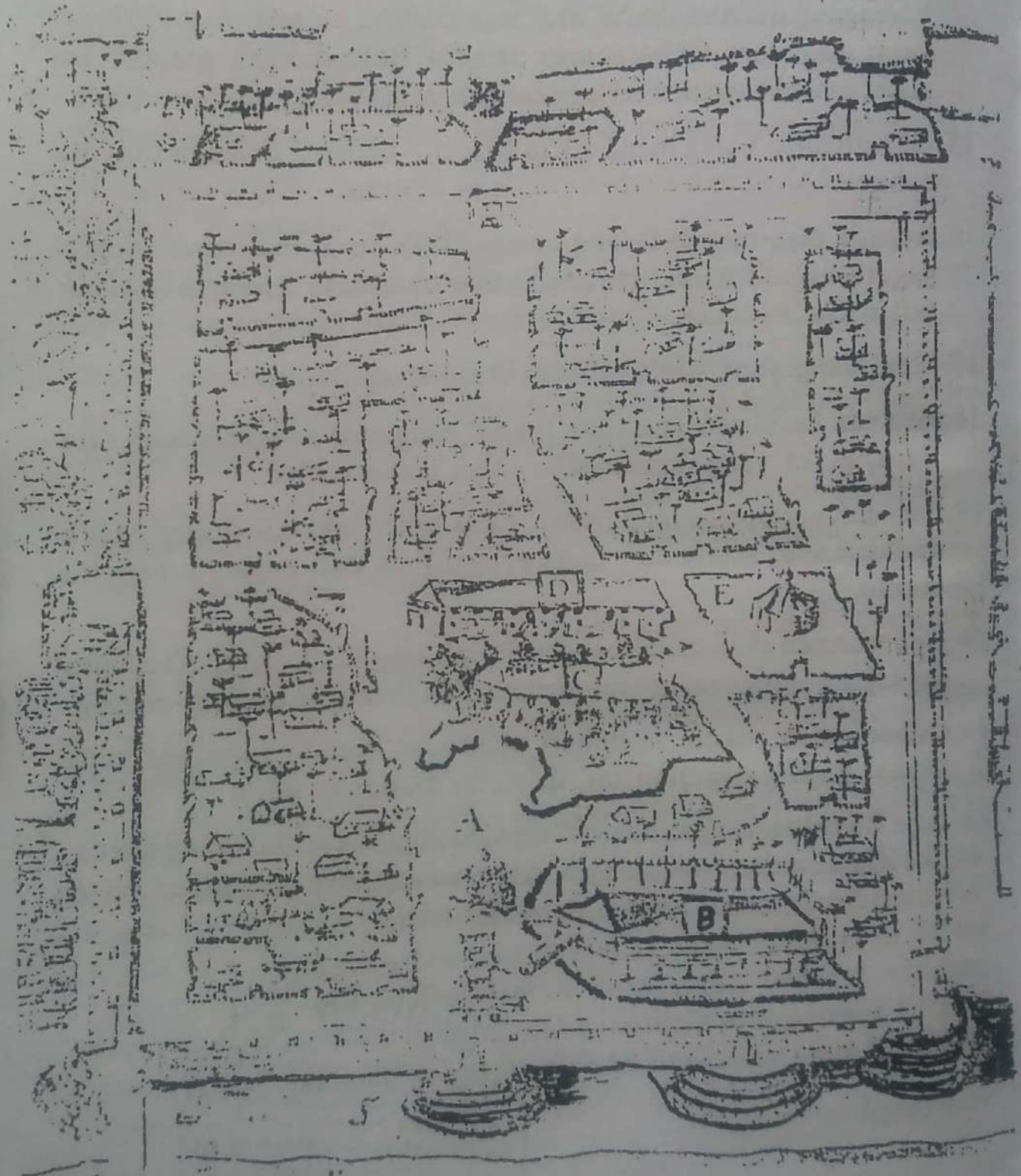
1. Perdamaian dan persahabatan antara Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan raja-raja yang masuk dalam perjanjian ini.
2. Gubernur Hindia Belanda di akui pembela dan pelindung persekutuan (Bondgenootschap).
3. Tidak ada kedaulatan di antara anggota-anggota sekutu selain dari pada saudara tua (Gubernur Hindia Belanda).
4. Raja Gowa dan Raja Bone di anggap selaku anggota-anggota tertua dan mereka itu menjamin barang-barang miliknya (daerah-daerah keperintahannya masing-masing).
5. Anggota-anggota sekutu memandang musuh-musuh dari Gubernemen sebagai musuh-musuhnya dan sahabat-sahabat dari Gubernemen sebagai sajabat-sahabatnya.
6. Luas dan batas-batas dari daerah-daerah keperintahan Gubernemen akan ditetapkan kemudian.
- 7-8. Keputusan mengenai perselisihan-perselisihan di antara anggota-anggota sekutu ada pada Gubernemen.
9. Raja-raja tidak akan berperang satu sama lain.
- 10-11-12. Ditetapkan, bahwa pembunuhan-pembunuhan selanjutnya tidak lagi dengan denda, hukuman-hukuman mengudung, tidak boleh lagi dilakukan dan tiap penjahat akan dihukum di dalam negeri, di mana dia melakukan kejahatan, menurut undang-undang yang berlaku di sana, di kecualikan orang-orang Kristen yang semuanya harus di hukum oleh hakim-hakim yang beragama Kristen.
13. Memajukan pertanian.

¹ Abdurrasak daeng Patunru, Sejarah Gowa. Makassar : Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, 1967, hal. 86 - 91

14. Rakyat dari raja-raja yang amsuk pada perjanjian ini boleh berdagang dimana-mana, asal saja mereka itu mempunyai surat-surat pas dari Gubernemen Hindia Belanda dan mereka itu membayar bea-cukai keluar masuk pelabuhan.
15. Gubernemen boleh mendirikan benteng-benteng di mana saja dia suka.
16. Kepada raja-raja di larang mengadakan surat-menyurat dengan negara-negara asing dan menerima duta-duta asing, jika tidak seizin Gubernemen.
17. Mata uang yang berlaku ialah mata uang Belanda.
18. Jika ada kesulitan-kesulitan timbul mengenai pengangkatan raja Baru, maka yang menetapkan ialah Gubernemen.
19. Sesudah perjanjian ini di tutup, tidak boleh lagi lain orang masuk di dalamnya, selain dari pada pengesahan dari anggota-anggota sekutu.
20. Gubernemen akan membuat perjanjian dengan tiap anggota sekutu sepanjang mengenai urusan-urusan rumah tangga masing-masing.
21. Gubernemen akan memberi bantuan kepada raja-raja yang terikat pada perjanjian ini, di mana dianggap perlu.
22. Raja Bone kehilangan haknya sebagai anggota sekutu yang tertua, jika dia di dalam tempo dua bulan sesudahnya perjanjian ini di tutup, tidak masuk dalam perjanjian ini.



ampiran : V



SOMBA OPU FORT, MACASSAR (c. 1638).

THW 16 38

OVERZICHTSKAART MAKASSAR

SCHAAL 1:100 000



Lampiran : VII

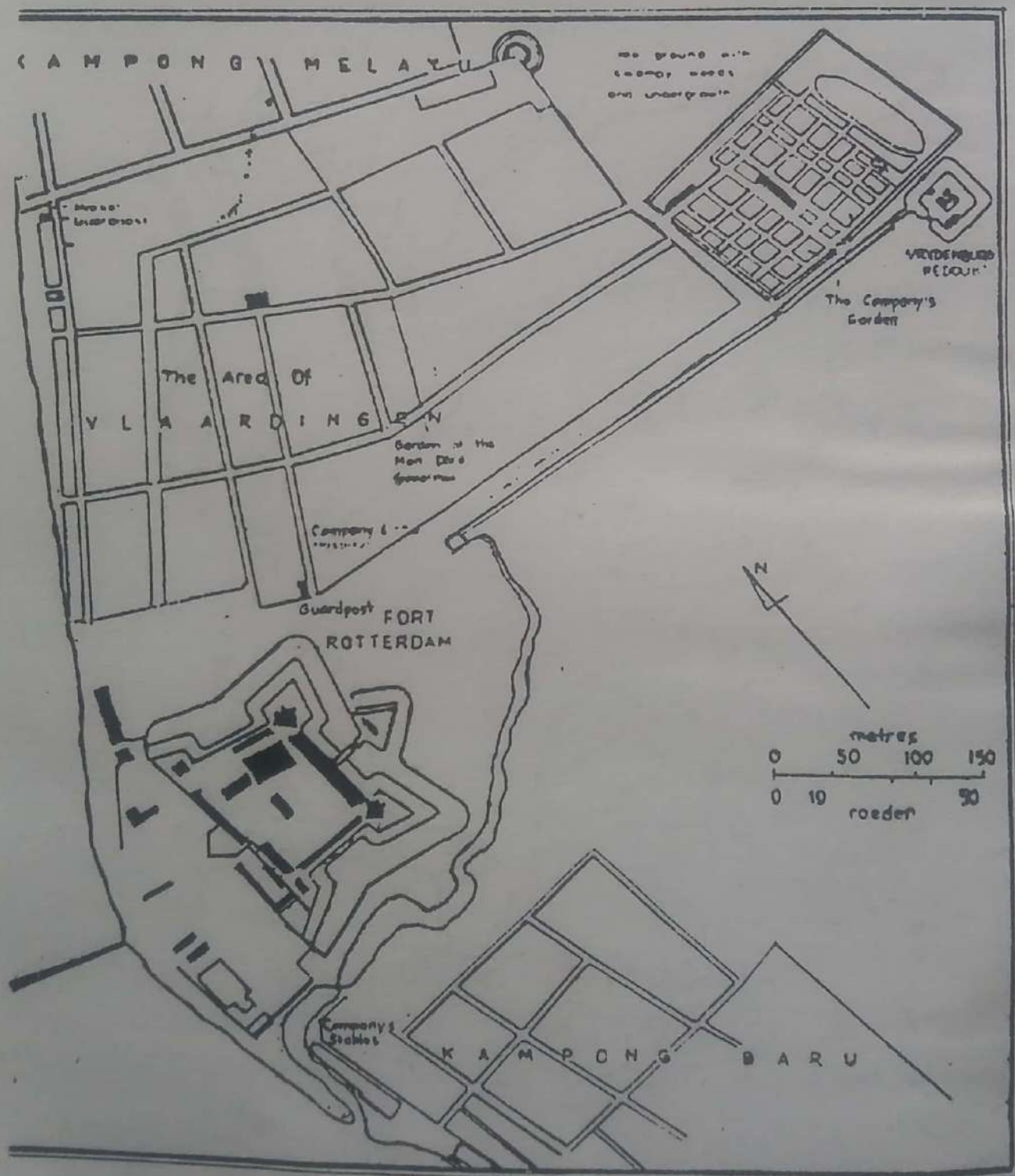
DAFTAR NAMA-NAMA WALIKOTA YANG PERNAH MENJABAT WALIKOTA MADYA UJUNG PANDANG

J. E. Damrink	1918-1927
J.H. de Groot	1927-1931
G.H.J. Beikenkamp	1931-1932
Ir.F.C. Van Lier	1932-1933
Ch.H. Ter Laag	1933-1934.
J. Leewis	1934-1936
H.F. Boone	1936-1942
Masa Pemerintahan Jepang	1942-1945
H.F. Boune	1945
D.M. Van Zwieten	1945-1946
Abd. Hamid Dg. Magassing	1947-1950
J.M. Qaimuddin	1950-1951
J. Mawengkang	1951
Dg. Lili	1951
Ahmad Dara Sjahrudin	1952-1956
H.M. Yusuf Dg. Mile	1956-1958
Abd. Latif Dg. Massikki	1958-1960
H. Aroeppala	1960-1965
Mayor M. Dg. Patompo	1965-1978
Abustam	1978-1988
Suwahyo	1988-1993

Amplian : 17



MAP OF THE ASSAM (1900)



Peta Makassar (Fort Rotterdam) pada abad ke XVII.